



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RSUD dr. ACHMAD DARWIS
TAHUN 2022**

Sarilamak, Agustus 2021



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2022.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2022 ini selesai disusun sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk penyusunan RKPD untuk peningkatan kinerja rumah sakit di tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Kesehatan dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 yaitu pembangunan sosial dan sumber daya manusia serta pembangunan prasarana dan sarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penerapan PPK-BLUD di RSUD dr. Achmad Darwis diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan sehingga belanja BLUD rumah sakit mengalami peningkatan yang signifikan. Subsidi Pemerintah ini mutlak diperlukan dalam rangka menunjang pelayanan dan pencapaian target kinerja pelayanan Rumah sakit.

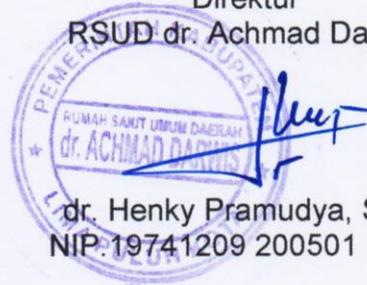
Investasi yang direncanakan adalah pembangunan sarana gedung kamar operasi yaitu Interior/MOT Ruang Operasi, Gedung Laboratorium dan Peralatan Kesehatan. Sedangkan subsidi operasional adalah untuk belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran serta subsidi bagi pasien kurang mampu. Apabila subsidi ini tidak dapat dipenuhi maka besar kemungkinan pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal.

Pada Akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2022 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja di tahun yang akan datang.

Namun demikian kami harapkan semoga Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2022 ini dapat berguna bagi kita semua.

Suliki, 6 Agustus 2021

Direktur
RSUD dr. Achmad Darwis



dr. Henky Pramudya, Sp.B
NIP.19741209 200501 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 28 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	I-10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-14
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD dr. ACHMAD DARWIS TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-94
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-97
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-100
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD dr. ACHMAD DARWIS.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022.....	III-2
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-8

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD dr. ACHMAD DARWIS.....	IV-1
4.1 Rencana Kinerja OPD tahun 2022 RSUD dr. Achmad Darwis.....	IV-1
4.2 Rencana Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022.....	IV-2
BAB V. PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

TABEL 1 :	Kalender Penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022.....	I-2
TABEL 2 :	Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020.. ..	II-1
TABEL 3 : (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju Tahun 2022.....	II-7
TABEL 4 :	Kinerja Pelayanan Rawat Jalan RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020.....	II-14
TABEL 5 :	Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020.....	II-16
TABEL 6 :	Indikator Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020.....	II-17
TABEL 7 :	Data Hari Rawatan di Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020.....	II-19
TABEL 8 :	Data Kunjungan Gawat Darurat dan Kamar Operasi th 2016-2020.....	II-20
TABEL 9 :	Kinerja Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr. Achmad Darwis Th 2016-2020.....	II-20
TABEL 10 :	Evaluasi Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020.....	II-21
TABEL 11 :	Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit.....	II-22
TABEL 12 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Sesuai Standar Tahun 2020.....	II-33
TABEL 13 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Jenis Obat Yang Terpenuhi dan Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2020.....	II-34
TABEL 14 :	Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.....	II-35
TABEL 15 :	Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020.....	II-38

TABEL 16 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Standar Tahun 2020.....	II-69
TABEL 17 :	Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit.....	II-71
TABEL 18 :	Nilai persepsi, Nilai Interval (NI), Nilai Interval Konversi (NIK), mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan.....	II-73
TABEL 19 :	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-74
TABEL 20 :	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-75
TABEL 21 :	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	II-76
TABEL 22 :	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Per Unsur di RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020.....	II-77
TABEL 23 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020.....	II-82
TABEL 24 :	Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja RS....	II-83
TABEL 25 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-87
TABEL 26 :	Kinerja Keuangan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2018-2020.....	II-89
TABEL 27 : (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota	II-93
TABEL 28: (T-C.31):	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-98
TABEL 29 : (T-C.32)	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota...	II-100
TABEL 30 :	Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022.....	III-3
TABEL 31 :	Rencana Pengembangan Produk Layanan RSUD dr.	

	Achmad Darwis.....	III-6
TABEL 32:	Rencana Target Kinerja IKU OPD RSUD dr. Achmad Darwis.....	IV-1
TABEL 33 : (T-C.33)	Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	IV-3
TABEL 34:	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.....	IV-7

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 :	Grafik Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit.....	II-22
GAMBAR 2 :	Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-24
GAMBAR 3 :	Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-24
GAMBAR 4 :	Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-25
GAMBAR 5 :	Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-27
GAMBAR 6 :	Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-28
GAMBAR 7 :	Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2020.....	II-28
GAMBAR 8 :	Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2020.....	II-28
GAMBAR 9 :	Dokumentasi Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN).....	II-30
GAMBAR 10 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Emergency Stretcher Tahun 2020.....	II-31
GAMBAR 11 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Monitor For Laparoscopy Th 2020.....	II-32
GAMBAR 12 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Laparoscopy Tahun 2020.....	II-32
GAMBAR 13 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Ventilator Transport Tahun 2020.....	II-32
GAMBAR 14 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Syringe Pump & Infuse Pump Tahun 2020.....	II-33
GAMBAR 15 :	Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.....	II-35
GAMBAR 16 :	Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Mata.....	II-70
GAMBAR 17 :	Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Penyakit Dalam....	II-70
GAMBAR 18 :	Dokumentasi Pelayanan Rongent Di Instalasi Radiologi.....	II-70

GAMBAR 19 :	Dokumentasi Pelayanan Makan Pasien Di Instalasi Gizi.....	II-71
GAMBAR 20 :	Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit.....	II-71
GAMBAR 21 :	Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-75
GAMBAR 22 :	Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-76
GAMBAR 23 :	Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	II-77
GAMBAR 24 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020.....	II-82
GAMBAR 25 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Farmasi Tahun 2020.....	II-82
GAMBAR 26 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Rawat Inap Kebidanan Tahun 2020.....	II-83
GAMBAR 27 :	Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit.....	II-84



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis Perangkat Daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Perangkat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam renstra Perangkat Daerah.

RKPD tahun 2022 ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. Pada saat penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis ini mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dan Rancangan Renstra RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahun 2022 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota, mengacu RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah RSUD dr. Achmad Darwis adalah sebagai berikut :

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan;
- III. Penyusunan Rancangan Renja;

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

V. Perumusan Rancangan;

VI. Penetapan Renja;

I. Persiapan Penyusunan

1. Pengusulan personil tim penyusunan Renja dari RSUD untuk diusulkan oleh Bapelitbang ke dalam Keputusan Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022.

2. Menghadiri pertemuan penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja di Bapelitbang. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan Renja.

3. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender penyusunan Renja. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:

Tabel 1.

Kalender Penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2021																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2022																												
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja																												
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja																												

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2021																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan Renja Bapelitbang sudah selaras dengan rancangan awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2021																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
5	Penyampaian kembali rancangan renja yang telah disempurnakan kepada Bapelitbang																																
D	Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah																																
1	Pelaksanaan Forum Gabungan PD oleh Bapelitbang sekaligus merupakan Forum PD masing-masing OPD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program																																

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2021																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua OPD oleh Bapelitbang kepada KD melalui sekretaris daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada renja menjadi Perkada Renja OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota																																

II. Penyusunan Rancangan

Pada bulan Januari 2021 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja RSUD dr. Achmad Darwis. Penyusunan berpedoman pada rancangan Renstra RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 –2026 dan hasil evaluasi Renja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Penyusunan rancangan awal Renja RSUD dr. Achmad Darwis disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Lalu;

- c. Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Achmad Darwis;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah yang penyajian Rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

Pada bulan Maret, Rancangan Renja yang telah disusun dan disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaan disampaikan kembali ke Bapelitbang.

IV. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbang dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum Gabungan Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili

pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis menjadi Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja RSUD dr. Achmad Darwis.

VI. Penutupan

Dalam hal penutupan Renja, Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis dikumpulkan ke Bapelitbang untuk di verifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Rencana kerja ini dibuat berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Suliki (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 138 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 78);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja ini dibuat adalah

A. Maksud

Penyusunan rancangan rencana kerja ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen awal perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebagai penjabaran dari rancangan Rencana Strategi (Renstra) RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021 - 2026 dengan mempertimbangkan perubahan – perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi di tahun 2022.

B. Tujuan

1. Sebagai pedoman/acuan awal perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022.
2. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2022.
3. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Renja RSUD dr. Achmad Darwis, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun lalu dan capaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis, analisa Kinerja pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja RSUD dr. Achmad Darwis serta program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis .
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisikan Rencana Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis dan Rencana Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022 serta tahun berencana maju (Tahun 2023).
- V. Penutup berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
RSUD dr. ACHMAD DARWIS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020 sekaligus realisasi APBD Tahun 2020 RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Administrasi Perkantoran	809.220.000,00	809.220.000,00	755.955.314,00	93,42
1	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	588.000.000,00	588.000.000,00	541.767.341,00	92,14
2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	171.800.000,00	171.800.000,00	166.670.000,00	97,01
3	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	17.920.000,00	17.920.000,00	17,808.000,00	99,38
4	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	31.500.000,00	31.500.000,00	29.709.973,00	94,32

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.075.650,00	63.804.000,00	47.075.750,00	73,78
1	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	45.075.650,00	63.804.000,00	47.075.750,00	73,78
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.131.000,00	4.167.000,00	4.038.800,00	96,92
1	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.131.000,00	4.167.000,00	4.038.800,00	96,92
IV	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	10.015.920.000,00	6.317.474.499,00	5.567.047.758,00	88,12
1	Kegiatan : Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III)	3.809.350.000,00	910.904.499,00	906.544.237,00	99,52
2	Kegiatan : Pengadaan alat-alat rumah sakit	6.096.570.000,00	5.296.570.000,00	4.660.503.521,00	87,99
3	Kegiatan : Pengembangan Tipe Rumah Sakit	110.000.000,00	110.000.000,00	0	0

V	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	732.270.000,00	832.284.000,00	713.229.648,00	85,70
1	Kegiatan : Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	482.270.000,00	582.284.000,00	529.400.000,00	90,92
2	Kegiatan : Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	250.000.000,00	250.000.000,00	183.829.648,00	73,53
VI	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	24.384.867.000,00	24.103.374.255,00	20.964.270.787,00	86,98
1	Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	24.384.867.000,00	24.103.374.255,00	20.964.270.787,00	86,98
	JUMLAH	35.990.483.650,00	32.130.323.754,00	28.051.618.057,00	87,31

Penjabaran Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

I. Program Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 588.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 588.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 541.767.341,00 atau 92,14%
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 171.800.000,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 171.800.000,00 dengan realisasi keuangan Rp 166.670.000,00 atau 97,01%.

3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 17.920.000,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 17.920.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 17.808.000,00 atau 99,38%.
4. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 31.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 31.500.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 29.709.973,00 atau 94,32%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 45.075.650,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 63.804.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 47.075.750,00 atau 73,78%.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.131.000,00 dan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.167.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 4.038.800,00 atau 96,92%.

IV. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1. Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.809.350.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp. 910.904.499,00 dengan realisasi keuangan Rp. 906.544.237,00 atau 99,52%.
2. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 6.096.570.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp. 5.296.570.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 4.660.503.521,00 atau 87,99%.
3. Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebelum perubahan Rp. 110.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan

Rp. 110.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 0 atau 0%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akreditasi Rumah Sakit, dengan capaian kinerja berupa Tidak terlaksananya Nilai Akreditasi Rumah Sakit. Karena wabah virus corona (Covid-19) maka Kegiatan tersebut tidak bisa direalisasikan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Bahwa Izin penyelenggaraan/operasional rumah sakit yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi bencana nasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), maka izin penyelenggaraan/ operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status bencana nasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Kegiatan persiapan dan survey Akreditasi untuk Rumah Sakit yang masa berlaku Sertifikat Akreditasinya berakhir baik sebelum atau sesudah *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), maka Sertifikat Akreditasi masih berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status bencana nasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), hal ini di berlakukan sebagai persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

V. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 482.270.000 dan Rp. 582.284.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 529.400.000,00 atau 90,92%.
2. Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 183.829.648,00 atau 73,53%.

VI. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 24.384.867.000,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 24.103.374.255,00 dengan realisasi keuangan Rp. 20.964.270.787,00 atau 86,98%.

Untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dan Prakiraan Maju Tahun 2022, dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 01 02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	-	2.854.991.321,00	809.220.000,00	755.955.314,00	93,42	-	-	-
1 01 02 02 01 01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan materi, peranko dan pengiriman surat kilat khusus	-	8.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1 01 02 02 01 02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/ majalah	-	1.315.837.249,00	588.000.000,00	541.767.341,00	92,14	-	-	-
1 01 02 02 01 07	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	549.710.000,00	171.800.000,00	166.670.000,00	97,01	-	-	-
1 01 02 02 01 10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor rumah sakit	-	176.179.100,00	-	-	-	-	-	-
1 01 02 02 01 11	Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01 02 02 01 12	Kegiatan penyediaan komp listrik /Penerangan kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01 02 02 01 13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01 02 02 01 17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan	-	556.548.000,00	17.920.000,00	17.808.000,00	99,38	-	-	-
1 01 02 02 01 18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	-	248.091.972,00	31.500.000,00	29.709.973,00	94,32	-	-	-

1	01	02	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	400.396.575,00	63.804.000,00	47.075.750,00	73,78	-	-	-	
1	01	02	02	05	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	09	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	-	194.568.000,00	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	24	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	205.828.575,00	63.804.000,00	47.075.750,00	73,78	-	-	-	
1	01	02	02	28	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	03	01	kegiatan pengadaan penunjuk waktu/ mesin absensi	Jumlah mesin absensi yang akan diadakan	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	03	02	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang akan diadakan	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kinerja sumber daya aparatur	-	228.595.714,00	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	05	01	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimtek/workshop/sosialisasi di Rumah Sakit	-	228.595.714,00	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	10.612.350,00	4.167.000,00	4.038.800,00	96,92	-	-	-	
1	01	02	02	06	01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan	-	10.612.350,00	4.167.000,00	4.038.800,00	96,92	-	-	-

1	01	02	02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	-	2.571.748.637,00	832.284.000,00	713.229.648,00	85,70	-	-	-	
1	01	02	02	28	05	Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit	-	1.466.655.500,00	582.284.000,00	529.400.000,00	90,92	-	-	-
1	01	02	02	28	07	Kegiatan kemitraan pengobatan pasien kurang mampu	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	-	1.105.093.137,00	250.000.000,00	183.829.648,00	73,53	-	-	-
1	01	02	02	33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD RS	Persentase peningkatan mutu pelayanan BLUD rumah sakit	-	63.631.327.908,00	24.103.374.255,00	20.964.270.787,00	86,98	-	-	-	
1	01	02	02	33	01	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD rumah sakit	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap	-	63.631.327.908,00	24.103.374.255,00	20.964.270.787,00	86,98	-	-	-
1	01	02	02	34	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	-	2.613.222.919,00	-	-	-	-	-	-	
1	01	01	02	34	02	Kegiatan sarana pelayanan kesehatan	Jumlah sarana sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	-	2.613.222.919,00	-	-	-	-	-	
					JUMLAH		-	100.213.047.278,12	32.130.323.754,00	28.051.618.057,00	87,31	-	-	-	

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 588.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 541.767.341,00 atau 92,14% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/majalah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan langgana koran/ majalah untuk 12 bulan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.800.000,00 dan realisasi keuangan Rp 166.670.000,00 atau 97,01% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pembayaran honorarium PNS, honorarium non PNS (PTTD) dan perjalanan dinas dalam daerah, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya honorarium PNS, honorarium non PNS (PTTD) dan perjalanan dinas dalam daerah.
3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.920.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 17.808.000,00 atau 99,38% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya makan minum rapat dan tamu rumah sakit untuk 12 bulan.
4. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.500.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 29.709.973,00 atau 94,32% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya belanja perjalanan dinas luar daerah untuk 12 bulan.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.804.000,00 dan realisasi

keuangan Rp. 47.075.750,00 atau 73,78% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan berupa service, penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak dan pajak kendaraan bermotor sebanyak 5 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda dua.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.167.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 4.038.800,00 atau 96,92% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran, laporan kinerja perencanaan serta perjalanan dinas dalam daerah, dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran, laporan kinerja perencanaan serta terbayarnya perjalanan dinas dalam daerah untuk 12 bulan.

IV. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1. Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 910.904.499,00 dan realisasi keuangan Rp. 906.544.237,00 atau 99,52% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit, dengan capaian kinerja berupa Tersedia dan terlaksananya 1 Dokumen Perencanaan (DED) Interior/MOT OK, 2 Paket Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif dan 1 Dokumen Perencanaan (DED) Pemagaran Rumah Sakit.
2. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.296.570.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 4.660.503.521,00 atau 87,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah alat kesehatan/kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C, dengan capaian kinerja berupa tersedianya

peralatan kesehatan Gedung IGD, Ruang Operasi dan Ruang Isolasi Covid 19.

3. Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 0 atau 0% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 0%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akreditasi Rumah Sakit, dengan capaian kinerja berupa Tidak terlaksananya Nilai Akreditasi Rumah Sakit. Karena wabah virus corona (Covid-19) maka Kegiatan tersebut tidak bisa direalisasikan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. Bahwa Izin penyelenggaraan/operasional rumah sakit yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi bencana nasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, maka izin penyelenggaraan/ operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status bencana nasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Kegiatan persiapan dan survey Akreditasi untuk Rumah Sakit yang masa berlaku Sertifikat Akreditasinya berakhir baik sebelum atau sesudah *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, maka Sertifikat Akreditasi masih berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status bencana nasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, hal ini di berlakukan sebagai persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

V. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 582.284.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 529.400.000,00 atau 90,92% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan pelayanan pasien oleh dokter reveral dan dokter WKDS selama 12 bulan.

2. Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 183.829.648,00 atau 73,53% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu, dengan capaian kinerja berupa terlayannya pelayanan pengobatan pasien kurang mampu di rumah sakit selama 12 bulan.

VI. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.103.374.255,00 dan realisasi keuangan Rp. 20.964.270.787,00 atau 86,98% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 86,98%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di Rumah Sakit : Rawat Jalan dan Rawat Inap, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Kegiatan PPK-BLUD RS dan penggunaan perkiraan surplus BLUD RS th 2019.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr Achmad Darwis

2.2.1 Kinerja Pelayanan Medik

Kinerja pelayanan medik dapat dilihat dari kunjungan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Kinerja pelayanan rawat jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.

Kinerja Pelayanan Rawat Jalan RSUD dr Achmad Darwis th 2016-2020

Kinerja kegiatan.	2016	2017	2018	2019	2020	Trend 2020
Poli umum	830	181	168	98	26	Menurun
Poli Penyakit Dalam	4583	7282	7935	8362	5913	Menurun
Poli Anak	1591	1470	1734	1945	1122	Menurun
Poli Bedah	3487	4014	3804	3772	2318	Menurun
Poli Kebidanan dan Kandungan	804	1354	1595	1629	996	Menurun
Poli Mata	3721	5741	3525	4337	2652	Menurun
Poli THT	941	0	804	1457	970	Menurun

Poli gigi	765	682	640	622	224	Menurun
Poli Syaraf	2694	3107	3297	3297	2587	Menurun
Poli Kulit Kelamin	0	0	1135	1484	836	Menurun
Poli Paru	766	2039	2852	3485	2641	Menurun
Poli Jantung	904	1755	2266	3032	2509	Menurun
Poli Jiwa	15	0	731	717	929	Meningkat
Fisioth, gizi, rehabilitas medis	1382	1852	1122	1032	617	Menurun
Perinatologi/bayi	-	-	-	5	7	Meningkat
Total kunjungan	21.629	22.483	29.477	35.274	24.347	Menurun

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis 2020

Dari data diatas terlihat bahwa total kunjungan rawat jalan pada tahun 2020 menurun 30,98% tetapi ada satu unit pelayanan yang kinerjanya meningkat seperti pelayanan Perinatologi/Bayi. Hal ini disebabkan dengan bencana non alam Pandemi Covid-19 yang mana masyarakat jadi enggan untuk mengunjungi pelayanan rawat jalan di RSUD dr. Achmad Darwis dikarenakan pengunjung yang memasuki area RSUD dr. Achmad Darwis harus sesuai protokol kesehatan dan dilakukan skiring oleh petugas.

Pelayanan poliklinik dokter umum menurun karena aturan BPJS bahwa rumah sakit hanya melayani poli spesialis karena merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2 atau lanjutan dan untuk pelayanan dokter umum berada di Puskesmas yang mana merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1 atau dasar.

Dengan demikian kinerja pemanfaatan layanan rawat jalan tidak dapat tercapai dimana terjadi penurunan 30,98 % dibanding sebelumnya.

Kinerja pelayanan rawat inap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.
Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020

Kinerja kegiatan.	2016	2017	2018	2019	2020	Trend Th. 2020
Kunjungan Rawat Inap Peny. Dalam	1663	1061	1636	1774	940	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Bedah	888	901	848	805	403	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Anak	450	267	484	526	232	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Obgyn & Gynekologi	695	720	811	553	323	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Perinatologi	185	203	493	284	159	Menurun
Kunjungan Rawat Inap ICU	3	200	4	2	5	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap NICU	0	0	0	0	24	-
Kunjungan Rawat Inap Penyakit Mata	22	35	15	28	4	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Paru	0	0	54	64	48	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Jantung	0	0	29	33	11	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Kulit Kelamin	0	0	4	3	3	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Saraf	0	0	11	31	25	Menurun
Kunjungan Rawat Inap THT	0	0	13	25	22	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Jiwa	0	0	0	1	0	Menurun
Jml Pasien	3906	3387	4402	4129	2201	Menurun

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat kunjungan pasien rawat inap tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 46,69 % dari tahun 2019. Terdapat beberapa peningkatan yang

cukup signifikan yaitu pada rawat inap ICU, namun terjadi penurunan pada kunjungan rawat inap disetiap unit pelayanan. Hal ini disebabkan bencana non alam Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan di RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2020.

Tabel 6.
Indikator Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020

Kinerja kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Standar Normal (Barber Johnson)
BOR	43,95	52,00	53,60	53,60	27,70	60 – 85%
ALOS	3,30	3,90	3,50	3,90	3,30	6 – 9 hari
TOI	5,10	4,42	3,90	3,90	12,10	1 – 3 hari
BTO	40,1	39,59	43,70	43,70	21,70	40 – 50 kali
GDR	35	48	5,58	5,28	69,06	≤ 45/1000
NDR	16,5	28,3	36,5	1,86	48,16	≤ 25/1000
Jlh TT	101	101	101	101	101	

Catatan :

- Bed Occupancy Ratio (BOR) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu.
- Average Length Of Stay (Av. LOS) adalah Rata-rata lamanya pasien dirawat
- Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur.
- Turn Over Interval (TOI) adalah Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati.
- Gross Death Rate (GDR) adalah Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.
- Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.

Angka BOR RSUD dr Achmad darwis belum memenuhi standar dalam arti pelayanan RS belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak kelemahan RSUD pada lokasi yang kurang strategis, sarana dan prasarana yang masih terbatas sejalan dengan ketersediaan anggaran yang masih terbatas pada pemenuhan sarana rawat inap terutama sarana ruang rawatan

Kelas I dan kelas utama dan juga dampak dari Pandemi Covid-19 yang mana terjadi penurunan di setiap kunjungan di RSUD dr. Achmad Darwis.

Berdasarkan indikator kinerja rumah sakit lainnya :

1. Terlihat bahwa ada perubahan tingkat hunian rumah sakit (BOR), dimana pada tahun 2016 = 43,95% tahun 2017 = 50,20% tahun 2018 = 53,60% dan pada tahun 2019 = 53,60% dan tahun 2020 menurun 27,70% .
jumlah tempat tidur 101 TT, Ini berarti untuk pemakaian tempat tidur di rumah sakit yang ditempati pasien setiap hari masih tetap sama pada tahun 2020 ini.
2. Lama hari rawat rata penderita (Av LOS) pada tahun 2016 yaitu 3,30 hari , tahun 2017 yaitu 3,90 hari, tahun 2018 yaitu 3,50 hari, tahun 2019 yaitu 3,50 hari dan tahun 2020 yaitu 3,70 hari.
hampir sama lama dirawat dibandingkan tahun 2019 yaitu 3 hari, dan ini lebih rendah dari standar nasional (6-9) hari. Angka ini menggambarkan tiga hal :
 - Pasien cepat sembuh, tingginya tingkat pelayanan pasien.
 - Paket klaim BPJS dengan pelayanan INA CBGs merubah pola pelayanan agar pasien cepat sembuh karena nilai pembayaran tidak berdasarkan lama rawatan akan tetapi paket diagnosa sehingga pasien dengan grup yang sama akan dibayarkan sama tanpa mempertimbangkan lama rawatan.
 - Pasien pulang meninggal atau dirujuk.
3. Angka BTO yang 21 kali menggambarkan bahwa satu tempat tidur rata-rata dipakai 21 kali oleh penderita selama satu tahun. Angka ini berarti frekwensi pemakaian tempat tidur akan bertambah dibanding tahun sebelumnya, Tahun 2019 yaitu 43 kali dan tahun 2020 yaitu 21 kali.
4. Angka TOI yang 12 hari menggambarkan bahwa 1 tempat tidur mengganggu (tidak ditempati pasien) sebelum ditempati pasien berikutnya rata-rata 12 hari. Hal ini menunjukkan lama tempat tidur mengganggu tahun 2019 yaitu 3 hari sedangkan pada tahun 2020 yaitu 12 hari.

Tabel 7.
Data Hari Rawatan di Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020

Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Trend Tahun 2020
Hari Rawatan Rawat Inap Peny. Dalam	7125	7920	7528	6610	4669	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Bedah	3636	3575	3711	2414	1844	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Anak	2075	1833	2267	1778	1201	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Obgyn & Gynekologi	2482	2205	2876	1380	1111	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Perinatologi	858	988	2172	1032	700	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap ICU	8	11	16	5	10	Meningkat
Hari Rawatan Rawat Inap Penyakit Mata	62	109	30	35	9	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Jantung	0	83	123	118	50	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Paru	0	172	239	277	274	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Saraf	0	43	37	157	137	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Kulit dan Kelamin	0	20	23	28	19	Menurun
Hari Rawatan Penyakit THT	0	0	62	80	77	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Jiwa	0	0	0	4	0	Menurun
Jumlah Hari Rawatan	16246	16959	19084	13918	10239	Menurun

Sumber: data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020.

Dari tabel diatas terlihat jumlah hari rawatan pasien rawat inap tahun 2020 terjadi penurunan 26,43% dari tahun 2019. Terdapat penurunan yang cukup signifikan jumlah hari rawatan yaitu pada seluruh unit pelayanan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis, hal ini disebabkan karena bencana non alam yaitu Pandemi

Covid-19 sehingga terjadi penurunan disetiap unit pelayanan yang ada. Sedangkan peningkatan jumlah hari rawatan pada rawatan ICU.

Tabel 8.
Data Kunjungan Gawat Darurat dan Kamar Operasi th 2016-2020

Kinerja Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Trend 2020
Kunj IGD	5851	5704	6694	6789	4433	Menurun
Op. Besar	5343	817	769	798	340	Menurun
Op. Sedang	422	463	574	463	286	Menurun
Op. Kecil	21	8	7	12	8	Menurun
Op obgyn	300	331	369	317	122	Menurun
Jumlah kunj Operasi	6086	1288	1350	1273	756	Menurun

Sumber: data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020

Dari data diatas terlihat penurunan jumlah kunjungan IGD pada tahun 2020 dibanding rata-rata tahun 2019 yaitu sebesar 34,70%. Sedangkan untuk pelayanan operasi di kamar operasi/bedah rumah sakit pada tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 40,61%. Hal ini disebabkan adanya bencana non alam Pandemi Covid-19.

2.2.2 Kinerja Pelayanan Penunjang

Kinerja pelayanan penunjang dapat dilihat dari kunjungan pelayanan laboratorium, radiologi dan pelayanan farmasi seperti tabel berikut :

Tabel 9.
Kinerja Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr. Achmad Darwis Th2016-2020

Kinerja keg.	2016	2017	2018	2019	2020	Trend 2020
Kunj. laboratorium	9.180	13.749	42.815	18.389	13.592	Menurun
Kunj. Radiologi	3.585	3.950	3.697	4.368	3.246	Menurun
Jlh R/ farmasi	114.461	112.297	190.469	203.402	135.732	Menurun
Kunj. Rehabilitasi Medik	1.307	1.723	1.283	1.608	549	Menurun
Kunj. UTDRS	715	819	667	564	606	Meningkat

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020

Dari tabel diatas trend kinerja pelayanan penunjang meningkat. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan kunjungan yang signifikan dalam tahun 2020 pada semua kunjungan di Laboratorium 26,08%, Radiologi 25,68%, Farmasi 33,27% dan Rehabilitasi Medik 65,86%. Kunjungan Pelayanan UTDRS meningkat sebesar 7,45% dibandingkan tahun kemarin.

Penilaian mutu pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis belum dievaluasi secara keseluruhan. Tabel dibawah ini menunjukkan beberapa penilaian yang telah dilakukan di RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020.

Tabel 10.
Evaluasi Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Capaian
1	Terpenuhi sumber daya rumah sakit	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	70,00%	80,46%
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	80,00%	81,72%
3	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00%	80,36%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	75,00%	67,25%

Analisis dan Capaian Kinerja

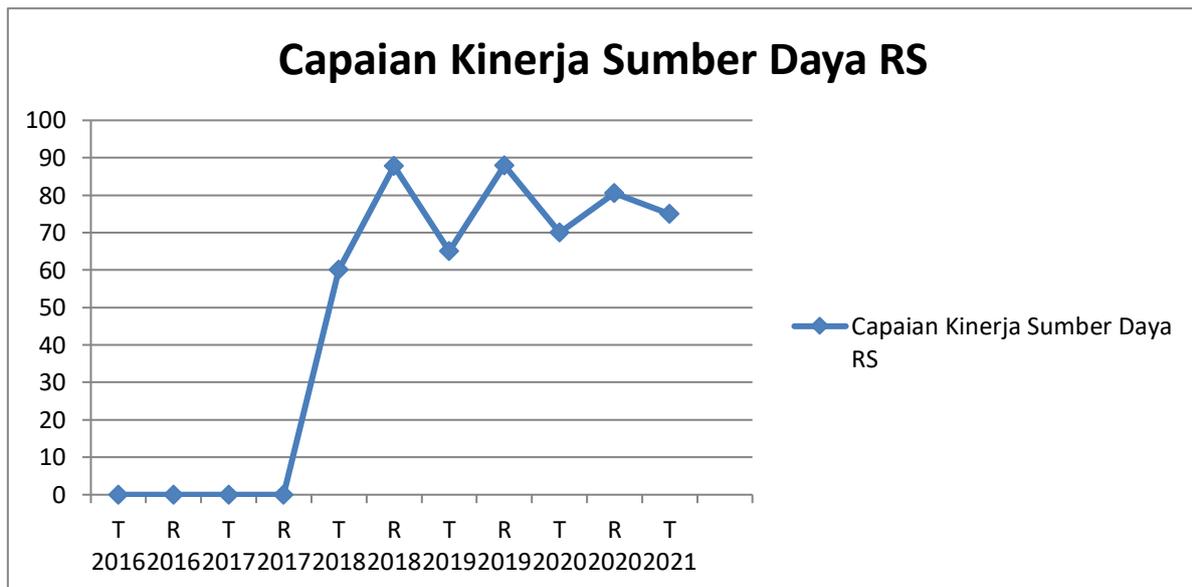
1. Terpenuhinya Sumber Daya Rumah Sakit

Tabel 11
Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T 2016	R 2016	T 2017	R 2017	T 2018	R 2018	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020	T 2021	Ket
1	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar		-	-	-	-	60%	87,83%	65%	87,98%	70%	80,46%	75%	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit dari tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 1
Grafik Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit



Dari Grafik Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 0 dengan Realisasi tahun 2016 = 0, Target tahun 2017 = 0 dengan Realisasi tahun 2017 = 0, Target tahun 2018 = 60% dengan Realisasi tahun 2018 = 87,83% , Target tahun 2019 = 65% dengan Realisasi tahun 2019 = 87,98% sedangkan untuk Target tahun 2020 = 70% dengan Realisasi tahun 2020 = 80,46% dan Target tahun 2021 = 75%.

Indikator ini adalah rata-rata jumlah komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis yang tersedia sesuai standar. Adapun komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis terdiri dari :

1. Persentase jenis obat yang terpenuhi.
2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar.
3. Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.

Rumus :

$$\frac{(\% \text{ jenis obat yang terpenuhi} + \% \text{ SDM yang sesuai standar} + \% \text{ ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes sesuai standar})}{3} \times 100\%$$

$$\frac{76,78 + 100,99 + 63,60}{3} \times 100\%$$

$$\frac{241,37}{3} \times 100\% = \mathbf{80,46\%}$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sumber daya rumah sakit sesuai standart di RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 adalah sebesar 80,46%.

Adapaun penjelasan komponen – komponen yang termasuk dalam sumber daya rumah sakit sesuai standart adalaha sebagai berikut :

1. Persentase Jenis Obat yang Terpenuhi

Jenis obat yang di rencanakan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 sebanyak 422 jenis obat, sedangkan pengadaan atau pembelian obat pada tahun 2020 sebanyak 324 jenis obat yang terpenuhi.

Jumlah item pembelian, pengadaan dan pemakaian obat fluktuatif per bulan pelayanan. Permintaan, pembelian dan penyediaan obat tergantung kasus penyakit yang ada perbulannya dengan memperhatikan pemakaian bulan sebelumnya, apabila tidak ada pemakaian/ kasus bulan berjalan maka tidak diadakan pembelian bulan berikutnya demikian juga sebaliknya.

Penyusunan dan perencanaan di RBA merujuk kepada RKO Nasional berdasarkan pola konsumsi pada tahun sebelumnya. Pembelian vaksin tidak direncanakan di RSUD dr. Achmad darwis dan apabila ada kasus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Propinsi.

Adapun perhitungan jenis obat yang terpenuhi selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

RUMUS :

$$\frac{\text{Jumlah jenis obat yang dibeli}}{\text{Jumlah jenis obat yang dianggarkan}} \times 100 =$$

$$\frac{324}{422} \times 100 = 76,78\%$$

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase Jenis Obat yang Terpenuhi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis pada tahun 2020 adalah sebesar 76,78 %.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020 :

GAMBAR 2

Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020



GAMBAR 3

Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020



GAMBAR 4
Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020



2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar pada tahun 2020 adalah :

a. Jumlah pegawai yang harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

Pada Tahun 2020 Jumlah Pegawai yang harus memiliki STR ditargetkan sebanyak 230 orang (seharusnya sebanyak 251 orang) , terealisasi sebanyak 250 orang.

Rincian jumlah pegawai yang harus memiliki STR sebanyak 251 orang adalah sebagai berikut :

No	Nama Profesi	STR	
		Ada	Tidak Ada
1	Profesi Dokter 35 Orang	√	-
2	Perawat 113 orang.	√	-
3	Perawat Gigi 3 orang.	√	-
4	Penata Anestesi 4 orang.	√	-
5	Bidan 45 orang.	√	-
6	Apoteker 6 orang.	√	-
7	Teknis Kefarmasian 10 orang	√	-
8	Kesling 1 orang.	-	√
9	Gizi 2 orang.	√	-
10	Fisioterapi 3 orang	√	-
11	Radiografer 6 orang.	√	-
12	Elekromedis 1 orang.	√	-

13	Refraksi Optision 2 orang.	√	-
14	Ahli Tekhnologi Laboratorium 11 orang.	√	-
15	Perekam Medis 9 orang.	√	-

$$\text{Perhitungan} : \frac{250}{251} \times 100 = 99,60 \%$$

b. Jumlah pegawai rumah sakit yang akan mengikuti diklat, sosialisasi, workshop dan Bimtek.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, sosialisasi, workhsop dan bimtek pada tahun 2020 di targetkan 376 orang, terealisasi sebanyak 385 orang.

$$\text{Perhitungan} : \frac{385}{376} \times 100 = 102,39\%$$

Adapun diklat, Sosialisasi, workshop dan bimtek yang diikuti pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Mengikuti seminar dan workshop tentang strategi dan deteksi dini perubahan kondisi klinis anak yang dirawat di rumah sakit sebanyak 2 orang.
- Mengikuti workshop Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi relasi psikologi dan komunikasi efektif tenaga kesehatan terhadap pasien dan sejawat sebanyak 25 orang.
- Mengikuti bimbingan akreditasi untuk Pokja Akses ke Rumah sakit dan Kontiunitas (ARK), Pokja Asesmen Pasien (AP), Pokja Pelayanan Asuhan Pasien (PAP) dan Pokja Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) sebanyak 100 orang.
- Mengikuti pelatihan pelayanan darah bagi perawat di Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD-RS) angkatan I sebanyak 1 orang.
- Mengikuti bimbingan akreditasi untuk Pokja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Pokja Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) dan Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) sebanyak 105 orang.
- Mengikuti bimbingan akreditasi untuk Pokja Sasaran Keselamatan Pasien (MFK), Pokja Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pokja Pelayanan

Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) dan Pokja Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS) sebanyak 75 orang.

- Mengikuti pelatihan pembinaan dan serifikasi Manajemen Risiko Rumah Sakit sebanyak 2 orang.
- Mengikuti bimbingan akreditasi untuk Pokja Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE), Pokja Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) dan Pokja Program Nasional (Prognas) sebanyak 70 orang.
- Mengikuti pelatihan Swab sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pelatihan MPP sebanyak 2 orang.

Perhitungan Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar pada tahun 2020 adalah :

RUMUS :

Jml pegawai yang harus memiliki STR + Jml pegawai RS yg akan mengikuti diklat, sos, workshop dan Bimtek X100%

2

$$\frac{99,60 + 102,39}{2} \times 100\% = 100,99 \%$$

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2020 adalah sebesar 100,99 %.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Tahun 2020 :

GAMBAR 5

Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020



GAMBAR 6
Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020



GAMBAR 7
Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2020



GAMBAR 8
Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2020



3. Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standart

- Sarana

Sarana yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis ada sebanyak 9 gedung pelayanan, menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sarana yang tertuang sebanyak 13 gedung pelayanan, jadi ada kekurangan 4 gedung pelayanan menurut standar Permenkes tersebut yang tertuang pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas.

Sarana yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis (9 Gedung Pelayanan) tersebut belum memenuhi atau mencukupi standar Permenkes, seperti gedung Laboratorium, gedung Radiologi, Gedung Gizi, Gedung Medical Record (MR) dan Gedung Pemulasaran Jenazah sehingga capaian bobot sarana sampai akhir tahun 2020 yang terinput dalam Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) di RSUD dr. Achmad Darwis adalah **71,62%**.

Kondisi saat ini ada 6 gedung lama yang tidak sesuai standart yang sudah harus direnovasi atau direhab sebagaimana tertuang dalam masterplan RSUD dr. Achmad Darwis.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pengadaan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Tahun 2020 :

GAMBAR 9
Dokumentasi Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)



- Prasarana

Prasarana menurut Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah 23 unit, sedangkan prasarana yang telah ada di RSUD dr. Achmad Darwis sekarang adalah 15 unit, jadi kekurangan prasarana sampai saat ini adalah 8 unit, menurut standar Permenkes tersebut yang tertuang pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Prasarana yang ada saat ini di RSUD dr. Achmad Darwis ada beberapa yang menumpang pada gedung pelayanan yang lain seperti IPSRS berada di gedung Gizi, Kesling berada di gedung poliklinik lama, sesuai daftar analisa. Capaian bobot prasarana sampai akhir tahun 2020 yang terinput dalam Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) adalah **68,57%**.

- Alat Kesehatan

Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 total alat kesehatan yang ada sebanyak 1.995 unit alat kesehatan, sedangkan alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis saat ini 1.297 unit alat kesehatan yang sesuai standart Permenkes tersebut yang tertuang pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Masih banyak jenis alat kesehatan sesuai standart yang belum ada di RSUD dr. Achmad Darwis, dapat dilihat kekurangan alat kesehatan sebanyak 698 unit di setiap ruangan pelayanan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis. Sehingga capaian bobot Alat Kesehatan sampai akhir tahun 2020 yang terinput dalam Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kondisi alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis sampai tahun 2020 adalah **50,60%**.

Kondisi alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis saat ini $\pm 15\%$ diantaranya adalah alat lama yang sudah harus diganti dengan alat baru dengan teknologi yang baru karena dari fungsinya banyak tidak terpakai lagi oleh user secara maksimal disebabkan karena sering rusak. Ketika diperbaiki oleh tenaga IPSRS tidak bertahan lama, jadi secara ekonomis juga tidak efisien lagi.

GAMBAR 10

Dokumentasi Pengadaan Alkes Emergency Stretcher Tahun 2020



GAMBAR 11
Dokumentasi Pengadaan Alkes Monitor For Laparascopy Tahun 2020



GAMBAR 12
Dokumentasi Pengadaan Alkes Laparascopy Tahun 2020



GAMBAR 13
Dokumentasi Pengadaan Alkes Ventilator Transport Tahun 2020



GAMBAR 14

Dokumentasi Pengadaan Alkes Syringe Pump & Infuse Pump Tahun 2020



Perhitungan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standart pada tahun 2020 adalah :

RUMUS :

$$\frac{\text{Persentase sarana} + \text{Persentase prasarana} + \text{Persentase alat kesehatan}}{100\%} \times 100\% = \frac{71,62 + 68,57 + 50,60}{3} \times 100\% = 63,60\%$$

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2020 adalah sebesar 63,60 %.

Adapun kegiatan tahun 2020 yang mendukung keberhasilan untuk terpenuhinya sumber daya rumah sakit yaitu persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar adalah sebagai berikut :

Tabel 12.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Sesuai Standar Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata - Kegiatan : Penambahan Ruang Rawat	

2	Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III)	Rp. 910.904.499,00
	- Kegiatan : Pengadaan Alat – Alat Rumah Sakit	Rp. 5.296.570.000,00
	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
	Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
	- Belanja Modal BLUD	Rp. 1.150.000.000,00
Jumlah		Rp. 7.357.474.499,00

Sedangkan untuk Komponen Pengadaan obat dan Sumbar Daya Manusia (SDM) rumah sakit kegiatannya berada pada anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Darwis pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2020 adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 13.
Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Jenis Obat Yang Terpenuhi dan Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
	Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
	- Belanja Obat-Obatan	Rp. 3.658.088.700,00
	- Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal RS	Rp. 273.028.355,00
Jumlah		Rp. 3.931.117.055,00

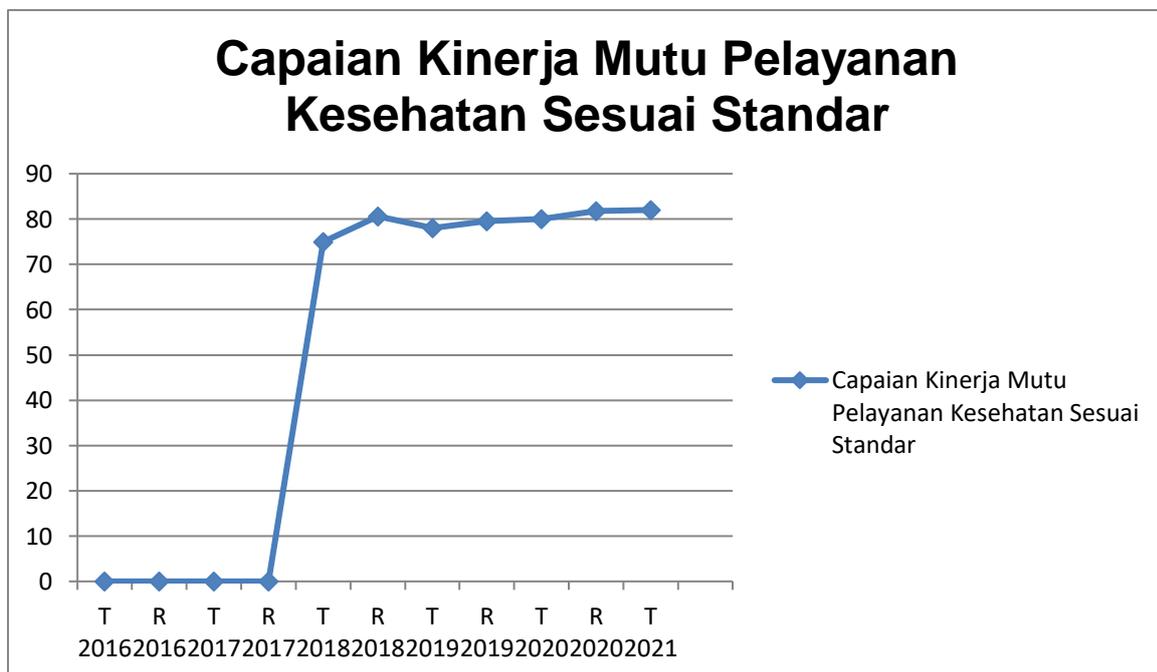
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 14
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	Ket
			2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	
1	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target		-	-	-	-	75 %	80,65 %	78 %	79,57 %	80 %	81,72 %	82 %	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar dari tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 15
Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar



Dari Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 0 dengan Realisasi tahun 2016 = 0, Target tahun 2017 = 0 dengan Realisasi tahun 2017 = 0, Target tahun 2018 = 75% dengan Realisasi tahun 2018 = 80,65% , Target tahun 2019 = 78% dengan Realisasi tahun

2019 = 79,57%, Target tahun 2020 = 80% dengan Realisasi tahun 2020 = 81,72% dan Target tahun 2021 = 82%.

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target merupakan indikator yang diukur untuk menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Trend capaian persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target 78% Tahun 2019.

Capaian persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target pada tahun 2020 sebesar 81,72%.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Achmad Darwis terdiri dari 22 jenis pelayanan dan 93 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masing – masing Bidang dan Sekretariat mempunyai jenis pelayanan dan indikator standar pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. RSUD dr. Achmad Darwis telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum daerah RSUD dr. Achmad Darwis, Berlaku untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

RSUD dr. Achmad Darwis memiliki 22 jenis pelayanan dan 93 indikator pelayanan SPM. Pada masing – masing bidang dan sekretariat memiliki berbeda beda jumlah jenis layanan dan indikator layanan sesuai dengan tupoksi masing – masing bidang dan sekretariat. Pembagian jenis pelayanan dan indikator pelayanan pada masing – masing bidang yaitu sekretaris dengan 2 jenis pelayanan dan 11 indikator pelayanan, bidang sarana, prasarana dan logistik dengan 4 jenis pelayanan dan 10 indikator pelayanan, bidang pelayanan medis dan keperawatan dengan 8 jenis pelayanan dan 44 indikator pelayanan, sedangkan untuk bidang penunjang dan promosi pengembangan rumah sakit dengan 8 jenis pelayanan dan 28 indikator pelayanan.

Dari penjelasan di atas, didapat perhitungan persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing – masing bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 11
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 10
2. Bidang Sarana, prasarana dan Logistik
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 10
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 7
3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 44
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 38
4. Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi Pengembangan Rumah Sakit
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 28
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 21

Sehingga jumlah seluruh indikator pelayanan SPM RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 sebanyak 93 indikator, sedangkan jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target sebanyak 76 indikator dan indikator pelayanan SPM yang tidak mencapai target sebanyak 17 indikator.

Tabel 15
Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Analisa	Ket
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan gawat darurat yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan gawat darurat yang mencapai target	8 indikator	7 indikator		Dari 8 indikator target yang terealisasi sebanyak 7 indikator $7/8 \times 100 = 87,50\%$	
1. Jenis Pelayanan Gawat Darurat						
	1. Kemampuan menangani life saving	100%	100%	Tercapai	Semua pasien gawat darurat yang datang ke IGD sudah mendapatkan pelayanan life saving sesuai standar	
	2. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	100%	100%	Tercapai	RSUD dr. Achmad Darwis sudah membuka layanan Instalasi gawat darurat selama 24 jam setiap hari	
	3. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ ACLS/PPGD	95%	100%	Tercapai	Semua petugas IGD yang menangani pasien sudah mempunyai sertifikat kegawat daruratan	

	4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim	Tercapai	RSUD dr. Achmad Darwis Sudah memiliki tim penanggulangan bencana	
	5. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat 5 menit	2 menit	1,5 menit	Tercapai	Waktu Tanggap di IGD sudah mencapai rata-rata 1,5 menit, Sudah terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsive untuk menyelamatkan pasien gawat darurat	
	6. Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	86%	0%	Tidak Tercapai	Tidak dilakukan survey kepuasan, selama masa pandemi untuk mengurangi keterpaparan petugas dengan pasien dan mempercepat proses pelayanan maka tidak dilakukan survey kepuasan pelanggan	
	7. Kematian pasien ≤ 24 jam	5 ‰	4,85 ‰	Tercapai	Berdasarkan target SPM yang ditetapkan RSUD dr. Achmad Darwis yaitu 5/1000, kematian pasien ≤ 24 jam di IGD sudah memenuhi standar. Sedangkan menurut standar Kemenkes yaitu ≤ 2/1000 belum tercapai target, hal ini disebabkan karena :	

					<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingat RSUD dr. Achmad Darwis adalah RS rujukan khususnya daerah Lima Puluh Kota dimana kasus yang datang ke IGD adalah kasus yang berat. 2. Adanya pemahaman masyarakat bahwa mereka akan dirawat bila penyakitnya sudah parah. 3. Untuk kasus berat dengan kondisi harus dirujuk ke fasilitas lebih lengkap keluarga sering menolak karena alasan tidak ada biaya keluarga yang menunggu 	
	8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	Tercapai	Sudah tidak ada pasien yang diharuskan menyerahkan uang muka kepada rumah sakit sebagai jaminan terhadap pertolongan medis yang diberikan	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rawat jalan yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rawat jalan yang mencapai target	6 indikator	4 indikator		<p>Dari 6 indikator target yang terealisasi sebanyak 4 indikator</p> <p>$4/6 \times 100 = 66,67\%$</p>	

2. Jenis Pelayanan Rawat Jalan						
	1. Pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	98%	100%	Tercapai	Poliklinik pelayanan rawat jalan di RSUD dr. Achmad Darwis sudah dilayani oleh tenaga dokter spesialis	
	2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%	100%	Tercapai	Sudah tersedia pelayanan rawat jalan spesialistik yang minimal harus ada di rumah sakit	
	3. Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00 WIB setiap hari kerja kecuali Jum'at 08.00 s/d 11.00 WIB	100%	100%	Tercapai	Jenis-jenis pelayanan rawat jalan spesialistik sudah buka sesuai ketentuan pelayanan	
	4. Waktu tunggu di rawat jalan 60 menit	≤ 60 menit	166 menit	Tidak Tercapai	Waktu tunggu pelayanan di poliklinik pada beberapa pelayanan belum mencapai standar yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : a. Masih adanya dokter spesialis yang sering terlambat ≥ 60 menit dari jam pelayanan yang telah ditetapkan. b. Sistem pendaftaran dan pencarian status rekam medik pasien kadang masih terkendala karena persoalan jaringan internet.	

					c. Selama masa pandemi corona-19 untuk meminimalisir keterpaparan terhadap Virus, Dokter Spesialis datang ke Poli setelah pasien berkumpul baru masuk poli untuk mulai pelayanan.	
	5. Kepuasan pelanggan	88%	0%	Tidak Tercapai	Tidak dilakukan survey kepuasan selamam masa pandemi Covid-19 untuk mengurangi keterpaparan petugas dengan pasien dan mempercepat proses pelayanan maka tidak dilakukan Survey Kepuasan Pelanggan.	
	6. Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategis DOTS	100%	100%	Tercapai	Sudah tercapai (Sesuai standar), semua pasien TBC yang datang sudah ditangani dengan sistem DOTS.	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rawat inap yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rawat inap yang mencapai target	10 indikator	9 indikator		Dari 10 indikator target yang terealisasi sebanyak 9 indikator 9/10 X100 = 90%	

3. Jenis pelayanan Rawat Inap						
	1. Pemberi pelayanan di rawat inap	100%	100%	Tercapai	Pemberi pelayanan rawat inap adalah dokter spesialis, dokter umum, perawat, Bidan dan pemberi asuhan lainnya yang mempunyai kompetensi.	
	2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	Tercapai	Semua pasien yang dirawat sudah mempunyai dokter penanggung jawab pelayanan.	
	3. Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%	100%	Tercapai	Semua pelayanan yang ditargetkan sudah dapat diberikan.	
	4. Jam visite Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%	Tercapai	Visite dokter spesialis sudah dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan antara jam 8.00 sampai dengan 14.00 WIB.	
	5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5%	0%	Tercapai	Tidak adanya pasien yang mengalami infeksi pasca operasi tahun 2020.	
	6. Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%	0,36%	Tercapai	Jumlah pasien yang mengalami infeksi nosokomial yaitu 0,39 %, sudah dibawah standar maksimal yang ditetapkan ≤ 1,5%, artinya pelaksanaan langkah-langkah	

					pengendalian pencegahan infeksi sudah berjalan dengan baik	
	7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100%	100%	Tercapai	Tidak adanya pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian artinya asesmen resiko jatuh dan pencegahan resiko jatuh sudah dijalankan oleh petugas	
	8. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%	0,40%	Tidak Tercapai	Kematian pasien > 48 jam diatas standar ini disebabkan oleh antara lain : a. pasien yang masuk dengan penyakit komplikasi. b. Pasien yang masuk adalah pasien terminal. c. pasien menolak dirujuk. d. Pasien tidak bisa dirujuk karena Rumah Sakit tujuan penuh/belum bisa menerima. e. Bayi BBLR dengan komplikasi.	
	9. Kejadian pulang paksa	≤ 5%	2,67%	Tercapai	Kejadian pulang atas permintaan pasien atau keluarga pasien sebanyak 2,67% tetapi masih sesuai dengan standar	

	10. Kepuasan pelanggan	≥ 89%	96,76%	Tercapai	Rata-rata pasien puas dengan layanan yang ada di RSUD dr. Achmad darwis yang dipantau melalui Survey Kepuasan Pelanggan.	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan bedah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan bedah yang mencapai target	7 indikator	6 indikator		Dari 7 indikator target yang terealisasi sebanyak 6 indikator 6/7 X100 = 85,71%	
4. Jenis pelayanan Bedah						
	1. Waktu tunggu operasi efektif	≤ 2 hari	> 2 hari (72 jam)	Tidak Tercapai	Kendala dokter spesialis anestesi yang merupakan reveral 2 kali dalam 1 minggu dan selama menunggu jadwal operasi jika pasien membutuhkan pelayanan kesehatan maka pasien dirawat di ruang rawat inap. Selama masa pandemi Covid-19 jika hasil skrining sebelum operasi pasien mengarah ke kasus Covid-19/Rapit test Reaktif maka sebelum dioperasipasien di Swab terlebih dahulu dan setelah hasil swab negatif baru	

					dlakukan tindakan operasi/bedah	
	2. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%	Tercapai	Tidak ada kematian pasien di meja operasi RSUD dr. Achmad Darwis.	
	3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian operasi salah sisi artinya program sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
	4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian operasi salahorang artinya program sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
	5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian operasi salah tindakan operasi artinya program sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
	6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kajadian tertinggal benda asing pada tubuh pasien artinya program sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
	7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6%	0%	Tercapai	Tidak ada Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube artinya program	

					sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan persalinan dan perinatologi yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan persalinan dan perinatologi yang mencapai target	7 indikator	6 indikator		Dari 7 indikator target yang terealisasi sebanyak 6 indikator 7/7 X100 = 100%	
5. Jenis pelayanan Persalinan dan Perinatologi						
	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan a. Perdarahan $\leq 1\%$	$\leq 1\%$	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian kematian ibu melahirkan karena perdarahan yang terjadi pada saat semua kala persalinan dan nifas	
	b. Pre-eklampsia	$\leq 30\%$	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian kematian ibu melahirkan karena preeklamsi dan eklamsi	
	c. Sepsis	$\leq 0,2\%$	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian kematian ibu melahirkan karena sepsis	
	2. Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	Tercapai	Semua Pemberi pelayanan persalinan normal adalah Dokter Sp. OG, bidan yang kompeten dan terlatih.	

	3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	100%	100%	Tercapai	Sudah tersedia Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yaitu tim PONEK yang terdiri Dokter Sp.OG, dokter umum terlatih, bidan dan perawat yang sudah terlatih sudah tersedia, namun jumlah yang dilatih harus terus ditingkatkan	
	4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	Tercapai	Tercapai sesuai standar	
	5. Kemampuan menangani BBLR 1500 – 2500 gr	100%	100%	Tercapai	Tercapai sesuai standar	
	6. Pertolongan persalinan melalui seksio caseria	34%	17,40%	Tercapai	RSUD dr. Achmad Darwis merupakan rumah sakit rujukan dari 22 puskesmas dan klinik swasta yang ada di wilayah Kab. Lima Puluh Kota. Semua pasien dengan persalinan normal harus sudah tertangani di Puskesmas atau bidan desa. Pasien dengan kasus persalinan dengan penyulit dan resiko tinggi yang ditemukan oleh bidan harus dirujuk ke Rs, sehingga	

					kasus rujukan pasien resiko tinggi meningkat di RSUD dr. Achmad Darwis. Tetapi masih memenuhi standar yang ditetapkan.	
	7. Kepuasan pelanggan	85%	90,58%	Tercapai	pernyataan puas pasien atas pelayanan persalinan sudah memenuhi standar artinya pelayanan persalinan yang diberikan sudah sesuai harapan pasien	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan intensif yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan intensif yang mencapai target	2 indikator	1 indikator		Dari 2 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator 1/2 X100 = 50%	
6. Jenis pelayanan Intensif						
	1. Rata – rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%	0%	Tercapai	Pasien yang kembali ke ruangan rawat intensif dari ruang rawat inap dengan kasus yang kecil dari nilai maksimal yang diperbolehkan	
	2. Pemberi pelayanan unit intensif	89%	72%	Tidak Tercapai	Belum sesuai standar karena untuk pemberi pelayanan dokter spesialis sudah terpenuhi sementara untuk perawat hanya 5 perawat	

					yang bersertifikat ICU nya masih berlaku.	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan radiologi yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan radiologi yang mencapai target	4 indikator	1 indikator		Dari 4 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator $1/4 \times 100 = 25\%$	
7. Jenis Pelayanan Radiologi						
	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax	≤ 3 jam	3,57 jam	Tidak Tercapai	Untuk pelayanan pada jam dinas rata-rata 1,5 jam, untuk diluar jam dinas lebih dari 3 jam. Kendalanya adalah pelayanan radiologi berlangsung selama 24 jam dengan jadwal dinas terbagi atas 3 shif, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Pagi = jam 8.00 – 14.00 - Sore = 14.00 – 20.00 - Malam = 20.00 – 8.00 Sedangkan dokter spesialis radiologi hanya 1 orang sehingga pembacaan hasil dilakukan pada jam dinas berikutnya.	

	2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen sama dr. Sp Radiologi	95%	76,78%	Tidak tercapai	Hal ini disebabkan karena pelayanan radiologi di RSUD dr. Achmad Darwis berlangsung 24 jam dengan jadwal dinas petugas radiografer dibagi atas 3 shift. - Pagi = jam 8.00 – 14.00 - Sore = 14.00 – 20.00 - Malam = 20.00 – 8.00 Sedangkan dokter spesialis radiologi hanya 1 orang dengan jadwal dinas pagi saja. Rontgen yang dilakukan diluar jadwal dinas dokter spesialis radiologi, ekspertise baru bisa dilakukan keesokan harinya.
	3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %	2,50 %	Tidak Tercapai	Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pada prosesor yang error sehingga hasil rontgen menjadi blur, penyebabnya adalah pasien yang kooperatif terutama pasien anak-anak sehingga hasil tidak sesuai.
	4. Kepuasan pelanggan	86%	86,50%	Tercapai	Pernyataan puas pasien atas pelayanan radiologi sudah memenuhi standar artinya

					elayanan radiologi yang diberikan sudah sesuai harapan pasien	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan laboratorium patologi klinik yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan laboratorium patologi klinik yang mencapai target	6 indikator	3 indikator		Dari 6 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator 3/6 X100 = 50%	
8. Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik						
	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (kimia darah dan darah rutin)	140 menit	124,08 menit	Tercapai	Pencapaian waktu tunggu pasien yaitu 124,08 menit	
	2. Pelaksana ekspertisi dr. Sp.PK	100%	86,60%	Tidak Tercapai	Hal ini disebabkan karena dokter spesialis patologi klinik hanya 1 orang sehingga terkendala untuk pembacaan hasil diluar jam dinas, jadwal pasien poliklinik yang datang periksa ke Laboratorium belum tertib karena waktu tunggu pasien di poliklinik masih belum tertib yang menyebabkan hasil pemeriksaan pasien selesai diluar jam dinas dokter	

					spesialis patologi klinik sehingga ekspertise ditanda tangani dihari berikutnya, verifikasi registrasi pencatatan masih manual	
	3. Kejadian kegagalan pelayanan laboratorium	7%	0%	Tercapai	Kejadian kegagalan pelayanan laboratorium tidak pernah terjadi pada tahun 2020	
	4. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	99,92%	Tidak Tercapai	Pencatatan dan barcode sampel masih manual, adanya pola ketenagaan yang harus dibenahi terkait proses sampling dan pemeriksaan	
	5. Kalibrasi alat laboratorium tepat waktu	98%	33,3%	Tidak Tercapai	Adanya kendala sarana dan prasarana dari lembaga kalibrasi yang ditunjuk sehingga belum semua alat yang berhasil dikalibrasi dan pelaksanaan sudah diakhir tahun.	
	6. Kepuasan pelanggan	80%	85%	Tercapai	Kepuasan pelanggan untuk laboratorium tercapai target	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rehabilitasi medik yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rehabilitasi medik yang mencapai target	3 indikator	3 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator $3/3 \times 100 = 100\%$	

9. Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik						
	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	1,40%	Tercapai	Adanya kasus Drop Out yang disebabkan kendala dari pasien untuk datang ke Rumah Sakit (Transportasi, Pendamping)	
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian kesalahan dalam melakukan tindakan rehabilitasi medik sehingga terrealisasi 100%	
	3. Kepuasan pelanggan	79%	84%	Tercapai	Kepuasan pelanggan untuk pelayanan rehabilitasi medik terealisasi 84%	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan farmasi yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan farmasi yang mencapai target	5 indikator	5 indikator		Dari 5 indikator target yang terealisasi sebanyak 5 indikator 5/5 X100 = 100%	
10. Jenis Pelayanan Farmasi						
	1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	17,93 menit	Tercapai	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah 7,93 menit	

	2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 36 menit	24,44 menit	Tercapai	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah 22,44 menit	
	3. Tidak adanya kesalahan pemberian obat	100%	100%	Tercapai	Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 tidak terjadi kesalahan pemberian obat pada pasien di instalasi farmasi yang dapat menimbulkan cedera atau kerugian pada pasien	
	4. Penulisan resep sesuai formularium	90%	90,63%	Tercapai	Hal ini terjadi karena ada beberapa obat yang dibutuhkan oleh pasien dan diresepkan oleh dokter penanggung jawab pelayanan yang tidak termasuk kedalam furnas tetapi masuk kedalam formularium rumah sakit.	
	5. Kepuasan pelanggan	84%	91,60%	Tercapai	Kepuasan pelanggan untuk pelayanan farmasi terealisasi 91,60%	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan gizi yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan gizi yang mencapai target	3 indikator	3 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator $3/3 \times 100 = 100\%$	

11. Jenis Pelayanan Gizi						
	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90%	100%	Tercapai	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien sudah sesuai dengan SPO jadwal pendistribusian makanan sudah di tentukan jadwalnya, sehingga petugas sudah melakukan pendistribusian makanan sesuai dengan jadwal	
	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 22%	16,50%	Tercapai	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien rata-rata 16,50%. Setiap petugas mengambil rantang kotor , petugas diharuskan mencatat makanan sisa dibuku register makanan sisa, sehingga sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien dapat dipantau	
	3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	Tercapai	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet, karena dalam pemberian makanan, pada setiap rantang selalu dibuat identitas pasien dan pada waktu penyerahan makanan disebutkan kembali nama pasien untuk mencegah terjadinya kesalahan	

Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan transfusi darah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan transfusi darah yang mencapai target	2 indikator	2 indikator		Dari 2 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator 2/2 X100 = 100%	
12. Jenis Pelayanan Transfusi Darah						
	1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	89%	91,30%	Tercapai	Berdasarkan dari data yang ada, hampir semua permintaan darah dari ruangan sudah terpenuhi, hanya saja ada beberapa kasus dimana permintaan tidak sesuai dengan darah yang ditransfusikan, seperti pada kasus pasien operasi secsio, setelah dilakukan operasi dan tidak terjadi perdarahan maka tidak jadi darah tersebut ditransfusikan kepada pasien. Ada juga kasus pasien di ruang rawatan dimana permintaan dokter 5 kantong darah ternyata setelah ditransfusikan darah ke pasien hanya 3 kantong, ternyata HB pasien sudah naik dan tidak perlu transfusi lagi	

	2. Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,02%	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian reaksi tranfusi di RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020. Kejadian reaksi transfusi adalah kejadian tidak diharapkan (KTD) yang terjadi akibat transfusi darah., dalam bentuk reaksi alergi, infeksi akibat transfusi hemolisi akibat golongan darah yang tidak sesuai atau gangguan sistem imun sebagai akibat pemberian transfusi darah.
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan GAKIN yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan GAKIN yang mencapai target	1 indikator	1 indikator		Dari 1 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator 1/1 X100 = 100%
13. Jenis Pelayanan GAKIN					
	1. Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan	100%	100%	Tercapai	Seluruh pasien yang perlu pelayanan di RSUD dr Achmad darwis sudah layani sesuai dengan standar dan apabila ada pasien miskin yang tidak punya jaminan maka apabila sesuai dengan persyaratan akan dilayanidengan dana kemitraan RS

Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rekam medik yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rekam medik yang mencapai target	4 indikator	3 indikator		Dari 4 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator $3/4 \times 100 = 75\%$	
14. Jenis Pelayanan Rekam Medik						
	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 1 x 24 jam setelah selesai pelayanan	99%	71,25%	Tidak Tercapai	Hal ini terjadi karena dokter DPJP tidak masuk setiap hari, karena pasien poliklinik banyak maka DPJP tidak sempat mengisi langsung, pasien ada yang pulang saat DPJP tidak masuk/hari libur, pasien yang rawat gabung harus mencari spesialis lain juga dipengaruhi oleh penyesuaian system kerja di era Covid-19	

	2. Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	98%	98,09%	Tercapai	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas, rata – rata adalah 98,06 belum 100% hal ini terjadi karena masih ada petugas yang belum melengkapi informed consent sebelum melakukan tindakan medis.
	3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	6,01 menit	Tercapai	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan rata – rata adalah 6,01 menit
	4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	8,03 menit	Tercapai	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap rata – rata adalah 8,03 menit
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pengolahan limbah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pengolahan limbah yang mencapai target	2 indikator	2 indikator		Dari 2 indikator target yang terealisasi sebanyak 2 indikator $2/2 \times 100 = 100\%$

15. Jenis Pelayanan Pengolahan Limbah						
	1. Baku mutu Limbah Cair a. BOD b. COD c. TSS d. PH	<30 mg/ltr <80 mg/ltr <30 mg/ltr 6 - 9	3,72 mg/ltr < 9,91 mg/ltr 3,00 mg/ltr 7,52	Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai	Pada tahun 2020 telah dilakukan 9 kali pemeriksaan yaitu bulan Januari s.d Desember 2020 Hasil yang dijadikan sampling adalah hasil pemeriksaan tanggal 16 Oktober 2020. Dari 9 kali pemeriksaan yang dilakukan terdapat 54 parameter yang diperiksa dari 54 parameter tersebut didapatkan hasil bahwa semua parameter memenuhi standar baku mutu (Laporan Hasil Uji dari UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang).	
	2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	Tercapai	Tahun 2020 pengelolaan limbah padat sesuai dengan Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015. Untuk pengelolaan limbah B3 diangkut ke tempat pengelolaan limbah B3 (Pihak ke tiga) menggunakan transporter yang berbadan hukum. Berdasarkan perhitungan di log book jumlah limbah B3 yang	

					dihasilkan 10.067,2 Kg dan jumlah yang diangkut sebanyak 10536 kg, ini dikarenakan pengangkutan terakhir pada tahun 2019 adalah tanggal 6 Desember 2019, jadi sisinya diangkut tahun 2020.	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan administrasi dan manajemen yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan administrasi dan manajemen yang mencapai target	9 indikator	8 indikator		Dari 9 indikator target yang terealisasi sebanyak 8 indikator 8/9X100 = 88,89%	
16. Jenis Pelayanan Administrasi dan Manajemen						
	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan Direksi	99%	100%	Tercapai	Setiap selesai pertemuan langsung ditindaklanjuti oleh bidang terkait	
	2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	99%	100%	Tercapai	Seluruh dokumen tersedia adapun waktu penyelesaiannya selama 2 bulan.	
	3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	Tercapai	Jml ASN yang naik pangkat = 43 orang	
	4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	Tercapai	Jumlah ASN yang mengurus kenaikan Gaji Berkala = 90 orang	
	5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	55%	29,52%	Tidak Tercapai	Jml seluruh pegawai 376 orang, jumlah pegawai yang mendapat diklat 111 orang	

					111/376 X 100= 29,52% Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sehingga banyak diklat yang tidak dilaksanakan.
	6. Cost Recovery	≥ 40%	51,90%	Tercapai	Total Pendapatan = 22.311.076.995 Total Belanja = 42.911.125.104 Rumus : $\frac{22.311.076.995}{42.911.125.104} \times 100$ = 51,90%
	7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tercapai	Laporan selesai dibuat sebelum tanggal 10 setiap bulannya
	8. Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	1 jam	Tercapai	Proses pembuatan administrasi dari ruang rawat inap dan UPAT
	9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	85%	100%	Tercapai	Diberikan 4 kali setahun setiap per triwulan
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan ambulance/ mobil jenazah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan ambulance/mobil jenazah yang mencapai target	3 indikator	3 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator 3/3X100 = 100%

17. Jenis pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah						
	1. Waktu pelayanan ambulance/mobil jenazah	100%	100%	Tercapai	Waktu pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis adalah 24 jam	
	2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di rumah sakit	≤ 230 menit	30 menit	Tercapai	Jumlah kecepatan ambulance dalam memberikan pelayanan adalah 30 menit, sedangkan Jumlah pelayanan ambulance 24 jam pada tahun 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelayanan =289 - Jumlah pelayanan ambulance yang diberikan = 280 $280/289 \times 100 = 96,89\%$	
	3. Waktu tanggap pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Maks.1 jam	1 jam	Tercapai	Waktu tanggap pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan yaitu 1 jam, dimana setiap masyarakat yang membutuhkan ambulance langsung diberikan pelayanan setelah menyelesaikan administrasinya	

Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pemulasaran jenazah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pemulasaran jenazah yang mencapai target	1 indikator	1 indikator		Dari 1 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator 1/1 X100 = 100%	
18. Jenis Pelayanan Pemulasaran Jenazah						
	1. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	2 jam	Tercapai	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah realisasi 2 jam karena memang tidak ada jenazah yang dilakukan pemulasarannya di RSUD dr Achmad Darwis. Semua pasien yang meninggal di RSUD dr Achmad Darwis langsung dibawa pulang oleh keluarganya. Perhitungan untuk waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah yaitu : 42 jam/21 orang = 2 jam	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pemeliharaan sarana yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pemeliharaan sarana yang mencapai target	3 indikator	1 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 2 indikator 1/3X100 = 33,33%	

19. Jenis pelayanan pemeliharaan sarana						
	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	<80%	78,64%	Tidak Tercapai	Jumlah laporan alat yang masuk = 103 laporan Jumlah laporan yang ditanggapi kurang dari 15 menit = 81 laporan $81/103 \times 100\% = 78,64\%$	
	2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	95%	58,64%	Tidak tercapai	Jumlah pemeliharaan alat = 868 alat Jumlah pemeliharaan alat yang sesuai jadwal pemeliharaan = 509 $509/868 \times 100\% = 58,64\%$ Target ini tidak tercapai karena kurangnya tenaga ATEM yang ada di rumah sakit serta peralatan/alat kerja untuk petugas yang masih kurang	
	3. Peralatan laboratorium, elektromedik, alkes lain dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan	75%	85,71%	Tercapai	Jumlah alat yang harus dikalibrasi = 175 alat Jumlah alat yang dilakukan kalibrasi = 150 $150/175 \times 100\% = 85,71\%$	

Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan laundry yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan laundry yang mencapai target	2 indikator	1 indikator		Dari 2 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator $1/2 \times 100 = 50\%$	
20. Jenis Pelayanan Laundry						
	1. Tidak ada kejadian linen yang hilang	100%	100%	Tercapai	Pengamatan dan laporan setiap bulan selama tahun 2020 tidak terdapat kejadian linen yang hilang	
	2. Ketepatan waktu untuk penyediaan linen ruang rawat inap	95%	82,94%	Tidak Tercapai	Pencapaian belum sesuai target dikarenakan keterbatasan fasilitas dan tenaga yaitu mesin cuci yang tersedia baru 1 unit dan tenaga laundry 3 orang sehingga tidak bisa melakukan tugas laundry secara optimal	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan PPI yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan PPI yang mencapai target	3 indikator	3 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator $3/3 \times 100 = 100\%$	
21. Jenis Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)						
	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	72%	75%	Tercapai	Sudah tercapai (Sesuai standar), Tim PPI yang ada di RSUD dr Achmad Darwis	

					sudah mengikuti pelatihan PPI,tetapi dengan adanya mutasi sebaiknya dilakukan penambahan pelatihan untuk anggota tim PPI baru	
	2. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) di setiap instalasi	≥ 60%	94%	Tercapai	Sudah tercapai (Sesuai standar), APD di RSUD dr Achmad darwis sudah tersedia di setiap ruangan	
	3. Kegiatan surveilans infeksi nosolomial / HAI (Health Care Associated Infection) di rumah sakit	≥ 75%	100%	Tercapai	Sudah tercapai (Sesuai standar),kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial sudah dilakukan dan hasilnya masih sesuai dengan standar	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan keamanan yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan keamanan yang mencapai target	2 indikator	2 indikator		Dari 2 indikator target terealisasi sebanyak 2 indikator 2/2 X 100 = 100%	
22. Jenis Pelayanan Keamanan						
	1. Petugas keamanan yang bersertifikat	100%	100%	Tercapai	Jumlah petugas keamanan yang memiliki sertifikat : 7 orang	
	2. Sistem Keamanan	Ada	Ada	Tercapai	Sistim pengamanan CCTV 24 jam dan 7 orang petugas keamanan	

Maka adapun perhitungan untuk persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target adalah sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target}}{\text{Seluruh Indikator SPM Rumah Sakit}} \times 100\%$$

$$\frac{76}{93} \times 100 = 81,72\%$$

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit mencapai target, dari target dari 80% terealisasi sebesar 81,72%.

Standar Pelayanan Minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan, karena indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.

Adapun kegiatan tahun 2020 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai standar adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Standar Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
	- Kegiatan : Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Rp. 582.284.000,00
	- Kegiatan : Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Rp. 250.000.000,00
	Jumlah	Rp. 832.284.000,00

Dokumentasi Kegiatan Mutu Pelayanan Sesuai Standar RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020 :

GAMBAR 16
Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Mata



GAMBAR 17
Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Penyakit Dalam



GAMBAR 18
Dokumentasi Pelayanan Rongent Di Instalasi Radiologi



GAMBAR 19
Dokumentasi Pelayanan Makan Pasien Di Instalasi Gizi



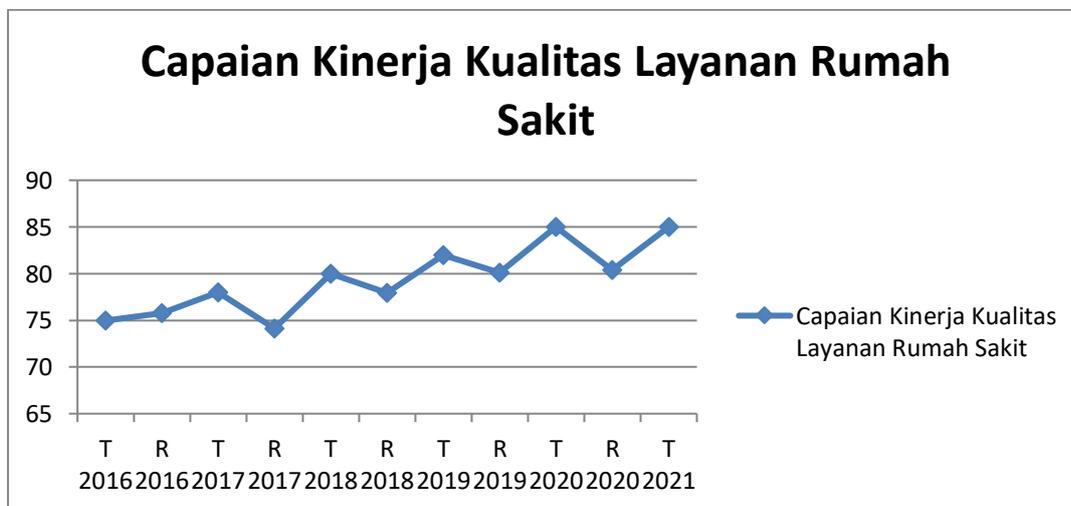
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit

Tabel 17
Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	Ket
			2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75%	75,75%	78%	74,13%	80%	77,94%	82%	80,08%	85%	80,36%	85%	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit dari tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 20
Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit



Dari Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 75% dengan Realisasi tahun 2016 = 75,75%, Target tahun 2017 = 78% dengan Realisasi tahun 2017 = 74,13%, Target tahun 2018 = 80% dengan Realisasi tahun 2018 = 77,94% , Target tahun 2019 = 82% dengan Realisasi tahun 2019 = 80,08%, Target tahun 2020 = 85% dengan Realisasi tahun 2020 = 80,36% dan Target tahun 2021 = 85%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahu dari adanya berbagai keluhan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas RSUD dr.Achmad Darwis baik pelayanan di rawat jalan, administrasi, laboratorium, farmasi, IGD maupun rawat inap, yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima, maka RSUD dr.Achmad Darwis berupaya meningkatkan kinerja pelayanan. Untuk menilai seberapa bagus kualitas pelayanan yang diberikan maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat di RSUD dr.Achmad Darwis.

Hasil penyusunan IKM ini akan dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kegiatan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2020 ini merupakan survey kesembilan untuk RSUD dr. Achmad Darwis. Survey dilakukan pada bulan akhir Juli sampai dengan awal bulan September 2020 di RSUD dr. Achmad Darwis.

Analisis Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Data yang diambil yaitu data primer, melalui kuesioner. Sampel yang diambil berjumlah 300 responden (dengan mempedomani tabel Morgan dan Krejcie). Pengisian dilakukan dengan tatap muka langsung. Kuesioner diisi langsung oleh responden.

Perhitungan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengukuran skala Likert

a. Setiap pertanyaan survey masing-masing unsur diberi nilai

Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan SKM terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Bobot NRT} = \frac{\text{Jumlah Bobot} = 1}{\text{Jumlah Unsur}} = N$$

N = Bobot Nilai per Unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Perspsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 18
Nilai persepsi, Nilai Interval (NI), Nilai Interval Konversi (NIK), mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai persepsi	(NI)	(NIK)	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat baik

2. Pengolahan data survey

Pengolahan data survey dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Pengolahan dengan komputer
- b. Pengolahan secara manual

3. Laporan hasil penyusunan indeks

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

Deskripsi Hasil Analisis

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada 300 orang responden dapat memberikan informasi kelompok mana yang dominan sehingga peningkatan kualitas pelayanan dapat dirancang dan diarahkan sesuai jenis kelamin yang dominan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

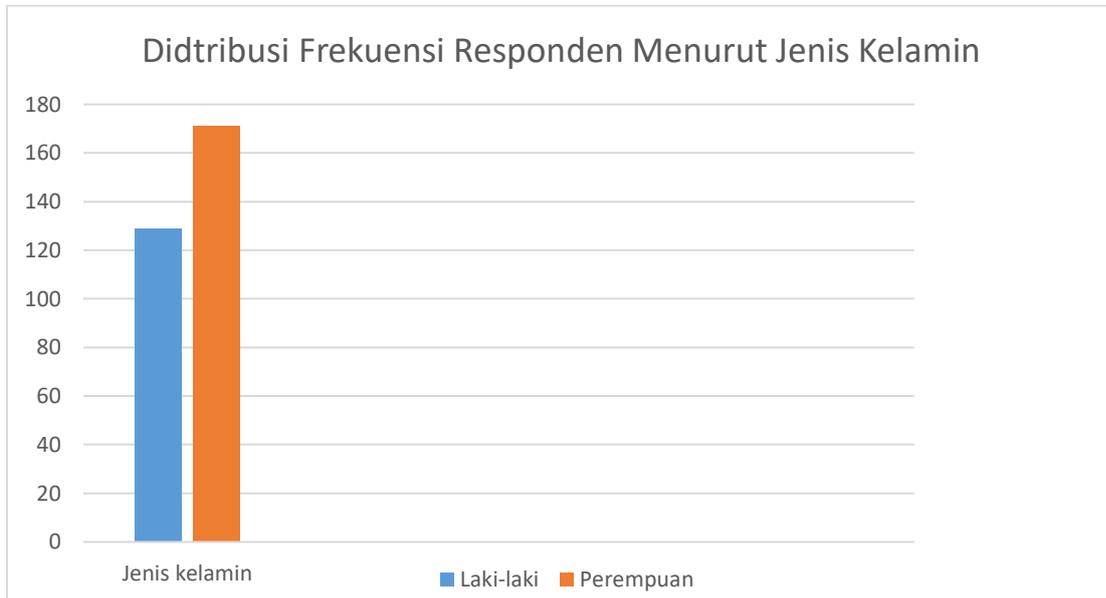
Tabel 19
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kategori Jenis Kelamin	Jumlah	
		Jumlah	(%)
1	Laki-laki	129	43
2	Perempuan	171	57
	Jumlah	300	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden perempuan dominan sebagai pengguna jasa pada RSUD dr.Achmad Darwis yaitu sebanyak 171 orang (57%) sedangkan responden laki-laki sebanyak 129 orang (43%).

Gambar 21

Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 20

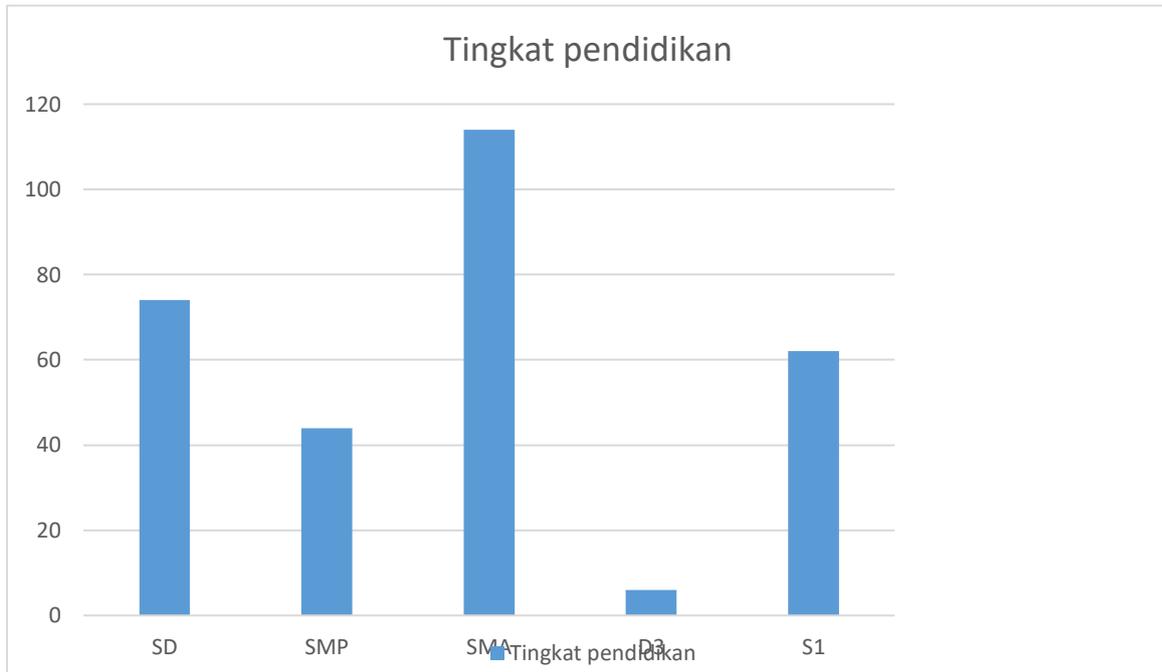
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1	SD	74	24.7
2	SLTP	44	14.6
3	SLTA	114	38
4	D3	6	2
5	S1	62	20.7
6	S2	-	-
	Jumlah	300	100

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa responden terbanyak yaitu tingkat pendidikan SLTA (38%), diikuti dengan kelompok pendidikan SD (24,7%).

Gambar 22

Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

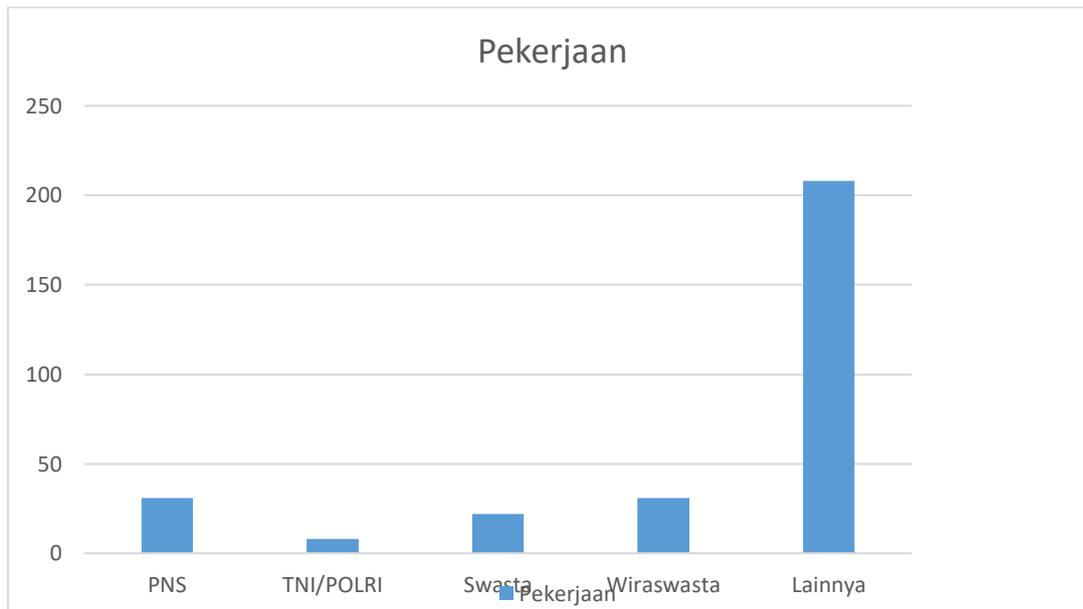
Tabel 21
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	31	10,3
2	TNI/POLRI	8	2,7
3	Swasta	22	7,4
4	Wiraswasta	31	10,3
5	Lainnya	208	69,3
Jumlah		300	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dengan status pekerjaan lainnya seperti petani, pedagang, pelajar dan sebagainya. Sedangkan minoritas responden yaitu dengan status pekerjaan sebagai TNI/POLRI.

Pekerjaan responden bermanfaat dalam memahami kemampuan ekonomi dan ekspektasi serta persepsi masyarakat pengguna jasa layanan RSUD dr.Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 23
Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan



Hasil Perhitungan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Analisis data survey kepuasan masyarakat di RSUD dr. Achmad Darwis dilakukan dengan sistem pengolahan data secara komputerisasi pada microsoft excell. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22
Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Per Unsur di RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020

Nomor	Unsur pelayanan	Nilai interval	Kinerja
U1	Persyaratan	3,25	Baik
U2	Prosedur	3,2	Baik
U3	Waktu pelayanan	3	Baik
U4	Biaya/tarif	3,3	Baik
U5	Produk layanan	3,2	Baik

U6	Kompetensi pelaksana	3,3	Baik
U7	Prilaku pelaksana	3,3	Baik
U8	Sarana dan prasarana	3	Baik
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,5	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa unsur sarana dan prasarana pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis perlu menjadi prioritas perhatian dalam meningkatkan pelayanan. Masalah waktu pelayanan juga tidak kalah penting. Pelanggan tentu menginginkan mendapatkan pelayanan yang tepat waktu.

Dari hasil penilaian IKM per unsur maka didapatkan nilai IKM di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu **80,36** yang tergolong dalam kriteria kinerja "**BAIK**".

Pembahasan

Semua unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Terdapat dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik yaitu :

- a. Indikator efisiensi, dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Indikator sufisiensi, dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat dan pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari survey yang dilakukan maka didapatkan nilai SKM sebesar 3.2 yang berada dalam Nilai Interval (NI) 3.06-3.53. Sehingga di dapatkan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 80,04 dengan Nilai Interval Konversi (NIK) antara 76.61 - 88.30. Angka ini menunjukkan bahwa Mutu Pelayanan yang diberikan di RSUD dr. Achmad Darwis mendapatkan nilai B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan

“Baik”. Bila dibandingkan dengan hasil survey pada tahun 2019 nilai IKM sebesar 80,01, maka terdapat peningkatan.

Istilah-istilah dalam penilaian IKM :

1) Unsur Persyaratan

Persyaratan untuk melakukan pengobatan ke RSUD dr. Achmad Darwis telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil survey dari unsur persyaratan maka diperoleh nilai yaitu 3,25 dengan kriteria “ BAIK”.

2) Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis telah dibuat standar yakni dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) pada setiap jenis layanan. Berdasarkan hasil survey dari unsur prosedur pelayanan maka diperoleh nilai yaitu 3,2 dengan kriteria “ BAIK”.

3) Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya persyaratan teknis dan administrasi hingga selesainya suatu proses pelayanan. Standar waktu pelayanan sangat penting bagi pengguna layanan untuk kejelasan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang mereka terima di tempat pelayanan. Kecepatan waktu pelayanan sangat ditentukan dengan ketepatan waktu pelayanan. Pada hasil survey dengan nilai skor terendah dari semua unsur pelayanan yaitu unsur waktu pelayanan dengan nilai 3. Walaupun masih dalam nilai baik, tetapi dengan skor terendah, tetap harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan di poliklinik terkait waktu tunggu pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu :

1. Belum terpenuhinya jumlah dokter spesialis pada tiap jenis pelayanan sehingga satu orang dokter masih harus tugas rangkap di rawat jalan, ICU, kamar operasi dan rawat inap pada hari yang sama.
2. Sebagian tenaga dokter spesialis masih tenaga referal dari rumah sakit lain yang kedatangannya setelah selesai pelayanan di rumah sakit asal

3. Adanya kondisi-kondisi khusus atau kegawatan pasien yang mengharuskan dokter terlebih dahulu harus melayani pasien di rawat inap, ICU atau kamar operasi
4. Sistem pendaftaran dan pencarian berkas rekam medik pasien kadang masih terkendala karena persoalan jaringan internet

4) Biaya/tarif

Kepuasan pasien terhadap variabel biaya/tarif pelayanan didapatkan angka 3,3 dengan kriteria “BAIK”. Ini kemungkinan terjadi karena sebagian besar pasien adalah peserta BPJS sehingga tidak dikenakan pembayaran saat melaksanakan pengobatan di RSUD dr. Achmad Darwis.

5) Produk layanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur produk layanan mendapatkan nilai 3,2 dengan kriteria “BAIK”.

6) Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta pengalaman yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur kompetensi pelaksana mendapatkan nilai 3,3 dengan kriteria “BAIK”.

7) Perilaku pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap, tingkah laku dan etika pemberi pelayanan saat melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur perilaku pelaksana mendapatkan nilai 3,3 dengan kriteria “BAIK”.

8) Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Di rumah sakit sarana dan prasarana meliputi semua fasilitas yang digunakan oleh pengunjung selama mendapatkan pelayanan, seperti fasilitas parkir, taman, ruang tunggu, kamar mandi, ruang pemeriksaan dsb. Berdasarkan hasil survey

didapatkan bahwa unsur sarana prasarana mendapatkan nilai 3, dimana kepuasan terhadap variabel sarana dan prasarana ini merupakan nilai paling rendah. Hal itu dapat disebabkan karena adanya beberapa penyesuaian terkait pelayanan di era pandemi Covid-19 baik alur, jumlah kursi tunggu di ruangan tunggu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pasien. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana di RSUD dr. Achmad Darwis Suliki harus diperhatikan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien.

9) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah prosedur, sarana dimana pasien dan atau keluarganya menyampaikan keluhan, masukan dan saran kepada rumah sakit atas pendapat, kepuasan atau ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diterima. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai 3,5 dengan kriteria "BAIK".

Rencana Tindak Lanjut

- 1) Dilakukan pembinaan berkala kepada semua lini untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan target semua unsur dapat bernilai sangat baik.
- 2) Melakukan supervisi berkala untuk semua sarana prasarana agar kualitas sarana prasarana terus dapat ditingkatkan
- 3) Melakukan perluasan ruangan tunggu pasien rawat jalan
- 4) Melakukan pembinaan berkala kepada semua karyawan terkait kedisiplinan waktu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna layanan pada RSUD dr. Achmad Darwis.

Adapun kegiatan tahun 2020 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatnya kualitas layanan rumah sakit yaitu bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan rumah sakit. Diantara kegiatannya adalah :

Tabel 23
Program dan Kegiatan yang Mendukung
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Rp. 19.022.257.200,00
Jumlah		Rp. 19.022.257.200,00

Dokumentasi Kegiatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Tahun 2020 :

GAMBAR 24

Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Gawat Darurat
Tahun 2020



GAMBAR 25

Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Farmasi Th 2020



GAMBAR 26

Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Rawat Inap Kebidanan Th 2020



4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Rumah Sakit

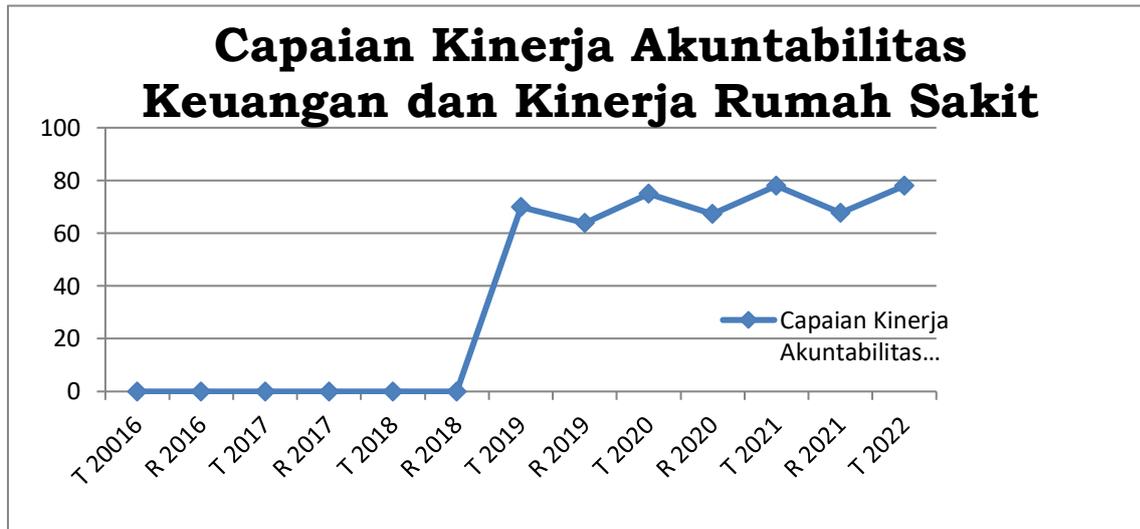
Tabel 24
Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target RPJ MD	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	Ket
			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
			0	0	0	0	0	0	19	19	20	20	21	21	22	
1	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit		-	-	-	-	-	-	70 %	63,89 %	75 %	67,25 %	78,00 %	67,74 %	78,00 %	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit dari tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 27

Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit



Dari Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit di atas dapat dilihat bahwa Target Tahun 2016 = 0 dengan Realisasi = 0, Target Tahun 2017 = 0 dengan Realisasi Tahun 2017 = 0, Target Tahun 2018 = 0 dengan Realisasi = 0, Target Tahun 2019 = 70% dengan Realisasi = 63,89%, Target Tahun 2020 = 75% dengan Realisasi = 67,25%, Target Tahun 2021 = 78,00% dengan Realisasi = 67,74% dan Target 2022 = 78,00%.

Indikator ini adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2020 tahun pembuatan 2021 memakai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2020 tahun pembuatan 2021, jadi LkjIP yang menjadi Indikator untuk nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit adalah LkjIP tahun 2020 yang telah dievaluasi oleh Inspektorat.

Saat ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 telah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperoleh nilai **67,74%** dengan kategori **BAIK** yaitu pengertiannya adalah Akuntabilitas Kinerja sudah BAIK, memiliki sitem yang dapat dipergunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Uraian hasil evaluasi atas masing – masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja meliputi evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan menunjukkan

perolehan nilai 21,87 atau 72,91% dari bobot sebesar 30% yang masuk kategori SANGAT BAIK.

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Target Kinerja sebagian belum relevan dengan kegiatan.
2. Renja Tahunan belum optimal dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran.
3. Rencana aksi belum optimal dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran menunjukkan perolehan nilai 14,69 atau 58,75% dari bobot 25% yang termasuk kategori CUKUP.

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. IKU yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semester) belum optimal.
4. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi.

C. Pelaporan Kinerja.

Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan perolehan nilai 10,42 atau 69,46% dari bobot sebesar 15% yang termasuk kategori BAIK.

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi ada yang belum sama pembandingnya sehingga persentase pencapaian tidak sesuai.
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan kinerja.

D. Evaluasi Internal.

Evaluasi atas evaluasi internal meliputi evaluasi terhadap Pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan perolehan nilai 6,93 atau 69,33% dari bobot sebesar 10% yang termasuk kategori BAIK.

Hasil evaluasi atas evaluasi internal, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum optimal dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak – pihak yang berkementingan.
2. Belum ada pemantauan Rencana aksi sehingga belum bisa memberikan alternatif perbaikan setiap periode dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Evaluasi atas pencapaian sasaran / kinerja organisasi meliputi evaluasi terhadap kinerja yang dilaporkan baik input maupun output menunjukkan perolehan 13,33 atau 66,67% dari bobot sebesar 20% yang termasuk kategori BAIK.

Hasil evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Adanya indikator yang belum diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid oleh karena pembandingnya yang belum cocok.

Jawaban Hasil Rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota (APIP) adalah sebagai berikut :

- A. Target kinerja akan diupayakan relevan dengan kegiatan.
- B. Renja tahunan akan dioptimalkan dalam penyusunan anggaran.

- C. Rencana aksi akan dioptimalkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- D. IKU akan di seleraskan dengan dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.
- E. Capaian kinerja mulai dari eselon IV ke atas akan dikaitkan dengan pemberian *reward dan punishment*.
- F. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran).
- G. Menggunakan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
- H. Akan membandingkan target dan realisasi sehingga persentase pencapaian bisa diukur.
- I. Menyajikan laporan kinerja dengan efisiensi sumber daya.
- J. Informasi dan laporan kinerja akan digunakan dalam perbaikan perencanaan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan.
- K. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi.
- L. Melaksanakan pemantauan rencana aksi dalam pengendalian kinerja.

Adapun kegiatan tahun 2020 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit adalah sebagai berikut :

Tabel 25
Program dan Kegiatan yang Mendukung
Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit
Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Kegiatan : Penyediaan Administrasi Keuangan - Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman - Kegiatan : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp. 588.000.000,00 Rp. 171.800.000,00 Rp. 17.920.000,00 Rp. 31.500.000,00

2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 63.804.000,00
3	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Kegiatan : Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 4.167.000,00
	Jumlah	Rp. 877.191.000,00

2.2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan RSUD dr Achmad Darwis dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 26
Kinerja Keuangan RSUD dr Achmad Darwis tahun 2018 – 2020

	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018	%	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	%	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	%
Pendapatan	22.384.867.000,00	21.851.611.148,00	97,62	23.084.867.000,00	23.423.444.667,33	101,5	21.384.747.000,00	22.311.076.995,00	104,33
Belanja	47.614.652.841,29	44.327.099.132,02	93,09	53.751.072.285,17	50.326.184.280,00	93,63	47.404.809.344,00	42.991.125.104,00	90,69
Belanja tdk Langsung	13.091.012.816,00	12.734.270.624,00	97,27	15.021.736.310,00	14.776.705.860,00	98,37	15.274.485.590,00	14.939.507.047,00	97,81
Belanja Langsung	34.523.640.025,29	31.592.828.508,02	91,51	38.729.335.975,17	35.549.478.420,00	91,79	32.130.323.754,00	28.051.618.057,00	87,31
- Belanja Pegawai	4.036.200.000,00	3.616.849.000,00	89,61	4.563.753.000,00	3.817.351.104,00	83,64	4.708.593.000,00	4.118.128.144,00	87,46
- Belanja Brg & Jasa	22.087.501.936,17	19.965.734.212,00	90,39	21.100.136.732,17	19.570.427.522,00	92,75	20.064.256.255,00	17.417.075.144,00	86,81
- Belanja Modal	8.399.938.089,12	8.010.245.296,02	95,36	13.065.446.243,00	12.161.699.794,00	93,08	7.357.474.499,00	6.516.414.769,00	88,57
Sulplus/ (Defisit)	(25.229.785.841,29)	(22.475.487.984,00)	89,08	(30.666.205.285,17)	(26.902.739.613,33)	87,73	(26.020.062.344,00)	(20.680.048.109,00)	79,48

Sumber : data keuangan RSUD dr Achmad Darwis Tahun 2020

Dari data Tahun 2020 diatas terlihat bahwa RSUD belum bisa membiayai belanja rutinnya karena masih defisit sebesar Rp 20.680.048.109,00 atau 79,48 % dari total belanja yang ada baik belanja tidak langsung, belanja langsung pegawai, barang jasa dan belanja modal.

Diharapkan sekali perhatian Pemda terhadap RSUD dr. Achmad Darwis lebih meningkat karena selain rumah sakit bersifat sosial untuk masyarakat, rumah sakit juga bersifat ekonomis untuk masyarakat menengah keatas dengan pendapatan Rumah Sakit menjadi PAD tertinggi.

Untuk melengkapi standar pelayanan Kelas C yang terakreditasi SNARS, RSUD dr. Achmad Darwis yang harus dipenuhi RSUD adalah sarana dan prasarana.

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 beberapa pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang telah dilakukan, yaitu :

1. Pembangunan gedung IGD PONEK tahun 2012.
2. Pembangunan gedung Perawatan ICU tahun 2014.
3. Pembangunan gedung Rawat Inap Penyakit Dalam tahun 2015.
4. Pembangunan gedung Poli Paru tahun 2015.
5. Pembangunan sarana air bersih tahun 2015.
6. Pembangunan Gedung Poliklinik bertingkat (Tingkat dua kantor) tahun 2016.
7. Pembangunan gedung rawat inap khusus paru tahun 2016.
8. Lanjutan pembangunan gedung perawatan ICU untuk NICU tahun 2016.
9. Drainase rumah sakit tahun 2017 (belum maksimal).
10. Pemagaran rumah sakit tahun 2017 (belum maksimal).
11. Pembangunan gedung Central Sterile Supply Departement (CSSD) tahun 2018.
12. Pembangunan gedung ruang kamar operasi tahun 2018 (belum representatif dan memenuhi standar akreditasi RS, karena hanya gedungnya saja peralatan dan asesoris untuk ruangan kamar operasi sebanyak 3 kamar belum terisi, sehingga gedung belum dapat digunakan untuk saat ini).
13. Pembangunan garase ambulance tahun 2018.
14. Pembangunan pembuatan paving block pekarangan rumah sakit tahun 2018 (belum maksimal).
15. Pembangunan rumah cold storage tahun 2018.

16. Pemeliharaan gedung kantor dan rawat inap lainnya setiap tahun anggaran.

17. Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi tahun 2019

18. Pembangunan Gedung Instalasi Laundry tahun 2019

19. Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) tahun 2020

Dalam melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana tidak hanya melengkapi sarana gedung saja, tetapi hal yang sangat penting adalah melengkapi alat kedokteran, alat labor, bahan habis pakai, obat-obatan, mobileur dan lainnya.

Diantara alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilengkapi tahun 2014 sampai tahun 2020 adalah

1. Alat bedah Laparaskopi (OK) tahun 2014
2. Alat operasi mata Feco tahun 2014.
3. Alat Radiologi (X-Ray) tahun 2015
4. Mikroskop Mata (Kamar Operasi) tahun 2015
5. Eccokardiografi tahun 2015
6. Treadmill tahun 2015
7. ECG tahun 2015
8. Pasien monitor tahun 2015
9. Centrifuge (Laboratorium) tahun 2015
10. Hematologi (Laboratorium) tahun 2015
11. ECG, syringe pump, Infuse pump, Patient monitor, slip lamp, Endoscopy THT, Antrostomi THT, suction, CPAP, Ventilator bayi, Incubator Bayi, Blod Gas Analyzer pengadaan tahun 2016.
12. Generator Set (Genset, Bangunan Genset dan Panel Listrik) DAK tahun 2017.
13. Bed Head tahun 2017.
14. Meja Operasi tahun 2017.
15. Mesin Anastesi tahun 2017.
16. USG 4 Dimensi untuk Radiologi (Penyakit Dalam) tahun 2017
17. Emergency Trolley tahun 2017.
18. ECG tahun 2017.
19. Stretcher tahun 2017.
20. Oximeter tahun 2017.
21. Patient monitor tahun 2017.

22. Biometri tahun 2017.
23. Meja Pemeriksa tahun 2017.
24. Infant warmer tahun 2017.
25. Autoclave tahun 2017.
26. Kendaraan ambulance transport DAK tahun 2017.
27. Pesawat sinar-x dental panoramic tahun 2018.
28. Steam Autoclave tahun 2018.
29. Automatic processing tahun 2018.
30. Phototerapi tahun 2018.
31. Mesin antrian untuk pasien tahun 2018.
32. Mesin pendingin sampar (cold storage) tahun 2018.
33. Vena Detektor tahun 2018.
34. Suction tahun 2018.
35. Dopler tahun 2018.
36. Resusitasi bayi tahun 2018.
37. Patient monitor tahun 2018.
38. Patient monitor anak tahun 2018.
39. Inkubator transport tahun 2018.
40. Box bayi tahun 2018.
41. Meja mayo tahun 2018.
42. Mesin Anastesi tahun 2019
43. Pendan surgery tahun 2019
44. Pendan anastesi tahun 2019
45. Patient monitor tahun 2019
46. USG 3-4 Dimensi tahun 2019
47. Steam Sterilizer tahun 2019
48. Washer Desinfektan tahun 2019
49. Ultrasonic tahun 2019
50. Emergency Stretcher Tahun 2020
51. Monitor For Laparascopy Tahun 2020
52. Laparascopy Tahun 2020
53. Ventilator Transport Tahun 2020
54. Syringe Pump & Infuse Pump Tahun 2020

Dalam melengkapi sarana, prasarana dan alat kesehatan/kedokteran rumah sakit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit klas C dan standar rumah sakit terakreditasi maka di tahun 2021 ini dilakukan Pengadaan Pembangunan dan Peralatan, antara lain :

1. Pembuatan Pagar Rumah Sakit
2. Pengadaan Alat Endoscopy (DAK)
3. Pengadaan Alat CPAP (DAK)
4. Pengadaan Alat Incubator Baby (DAK)
5. Pengadaan Alat Infant Warmer (DAK)
6. USG Portable
7. Pengadaan alat kesehatan/kedokteran lainnya (BLUD).
8. Perbaikan gedung – gedung di rumah sakit (BLUD).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 27 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rentra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase sumber daya rumah sakit sesuaistandar	Permenkes Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan	Terpenuhinya sumber daya rumah sakit	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	87,98%	80,46%	0	66,00%	66,00%	-
2	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK /II/ 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum daerah RSUD dr. Achmad Darwis, Berlaku untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	78,00%	80,00%	82,00%	82,00%	79,57%	81,72%	0	80,00%	80,00%	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai dasar PermenPAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	82,00%	85,00%	85,00%	85,00%	80,08%	80,36%	0	81,00%	81,00%	-
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat/ APIP di tahun N	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	70,00%	75,00%	78,00%	78,00%	63,89%	67,25%	0	64,00%	64,00%	-

Jadi berdasarkan data tabel Tabel 27 (T-C.30) dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Achmad Darwis pada tahun 2020 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Target = 85,00% terealisasi sebesar 80,36% dan Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit dari Target = 75,00% terealisasi sebesar 67,25%, namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Indikator : Persentase Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar dari Target = 70,00% terealisasi sebesar 80,46% dan Indikator : Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target dari Target = 80,00% terealisasi sebesar 81,72%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Achmad Darwis

Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 secara umum baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik maupun kinerja keuangan, yang sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pencapaian sasaran kinerja sejalan dengan pencapaian Misi ke 3 Kepala Daerah, yaitu : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Sasaran : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan Indikator Kinerja : Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target dan untuk tahun 2020 dari target 80% RSUD dr. Achmad Darwis berhasil merealisasikan sebesar 81,72%. Dalam hal ini terlihat bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis sudah sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

a. Faktor Internal

- Jenis dan jumlah SDM masih kurang.
- Tarif pelayanan rumah sakit sudah tidak sesuai tingkat kewajaran.
- Sarana, prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas C sehingga perlu adanya

penambahan untuk gedung, kendaraan dan peralatan kesehatan/kedokteran baik medik dan Non Medik (Permenkes 47 Tahun 2021).

- Pemagaran sekeliling rumah sakit dan pekarangan parkir rumah sakit.
- SIMRS masih belum optimal.
- Keamanan masih perlu ditingkatkan.
- Mutu pelayanan masih perlu ditingkatkan.
- Gedung kamar operasi yang belum bisa digunakan (alat kesehatan/kedokteran dan asesorir untuk 3 ruang/kamar operasi belum terisi sehingga gedung belum bisa dimanfaatkan/digunakan saat ini).

b. Faktor Eksternal

- Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota belum memanfaatkan rumah sakit secara maksimal, sebagian masih berobat ke kota.
- Kurangnya perhatian Pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit, sehingga rumah sakit masih mengandalkan anggaran dari DAK yang memiliki menu serta juklak dan Juknis khusus, padahal kebutuhan rumah sakit tidak tertuang dalam menu DAK tersebut.
- Lokasi rumah sakit yang jauh dari pusat kota.
- Transportasi yang kurang lancar.
- Masih ada masyarakat kurang mampu tidak memiliki jaminan kesehatan.
- Belum adanya kebijakan yang mengikat agar seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota mau menggunakan akses berobat ke RSUD dr. Achmad Darwis.

Berdasarkan permasalahan diatas jumlah SDM yang kurang merupakan masalah yang cukup mendasar dalam rangka peningkatan mutu layanan di rumah sakit. Menyikapi permasalahan ini kedepan perlu adanya penambahan sumber daya manusia di setiap bidang yang membutuhkan.

Permasalahan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu masih kurangnya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana di RSUD dr Achmad Darwis saat ini adalah kurang refresentatifnya dan tidak memenuhi standar bangunan yang ada. Rata – rata bangunan yang ada sudah lama dan sudah harus dilakukan perbaikan dan renovasi bahkan dilakukan penambahan gedung

baru. Saat ini sudah ada penambahan gedung baru dan perbaikan gedung – gedung yang rusak melalui anggaran APBD, DAK dan BLUD rumah sakit. Kedepan masih banyak yang harus diperbaiki dan pembangunan gedung baru diantaranya gedung Rekam Medis/Medical Record, penambahan ruang rawat inap, serta perbaikan gedung – gedung rumah sakit dikarenakan masih banyaknya gedung-gedung lama sesuai master plan rumah sakit.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis sangat ditunjang oleh ketersediaan peralatan kesehatan/kedokteran, kondisi saat ini peralatan kedokteran yang tersedia belum memadai sehingga pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kebutuhan RSUD dr. Achmad Darwis yaitu peralatan kesehatan yang sangat dibutuhkan di RSUD dr. Achmad Darwis.

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik bidang kesehatan rujukan, beberapa hal yang menjadi peluang sekaligus strategi untuk mengatasi permasalahan atau upaya peningkatan pelayanan adalah :

1. Tersedianya sumber daya yang memadai.
2. Menyusun usulan perubahan tarif melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
3. Tersedianya sarana dan prasarana di RSUD dr. Achmad Darwis
4. Tersedianya anggaran rumah sakit yang memadai.
5. Pembenahan manajemen keuangan RSUD dr. Achmad Darwis.
6. Terlaksananya pelaksanaan Akreditasi rumah sakit versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 untuk tahun 2022 dengan lulus paripurna SNARS.
7. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan RSUD dr. Achmad Darwis oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, DPRD dalam pengembangan rumah sakit sesuai master plan rumah sakit.
9. Adanya dukungan pemerintah Daerah untuk alokasi dana untuk pengadaan alat kesehatan dan asesoris 3 ruangan/kamar operasi agar dapat digunakan gedung kamar operasi yang dibangun tahun 2018 dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
10. Meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

11. Bekerjanya Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dalam RSUD dr. Achmad Darwis.
12. Adanya upaya pemeliharaan keamanan dilingkungan RSUD dr. Achmad Darwis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahap awal rancangan yang telah disusun pada RSUD dr. Achmad Darwis telah mengalami penyesuaian dengan perencanaan kinerja RSUD dr. Achmad Darwis. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD dr. Achmad Darwis.

Dalam pengajuan jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga SKPD harus benar – benar memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2022.

Tabel 28 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

PERANGKAT DAERAH : RSUD dr. ACHMAD DARWIS											
NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	64% ; 81%	45.162.975.550,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Nilai AKIP; Indeks RB; Nilai IKM	64,00% ; 53,33%; 81,00%	53.315.475.550,00	IKU OPD, IKM
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD AD	Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit	64%	4.816.800,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD AD	Nilai AKIP; Indeks RB	64,00% ; 53,33%;	4.816.800,00	IKU OPD
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RSUD AD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan serta jumlah OH perjalanan dinas dalam kota	9 dokumen dan 51 laporan serta perjalanan dinas dalam kota = 34 OH	4.816.800,00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RSUD AD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan serta jumlah OH perjalanan dinas dalam kota	9 dokumen dan 51 laporan serta perjalanan dinas dalam kota = 34 OH	4.816.800,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AD	Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit	64%	19.959.364.750,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AD	Nilai AKIP; Indeks RB	64,00% ; 53,33%;	28.111.864.750,00	IKU OPD
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RSUD AD	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan serta Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan	220 orang dan honorarium tim pelaksana = 12 bulan	19.959.364.750,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RSUD AD	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, jumlah tenaga ASN yang menerima insentif dan Jumlah PPPK	221 orang, 12 bulan, 80 orang dan 6 orang	28.111.864.750,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD AD	Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit	64%	84.512.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD AD	Nilai AKIP; Indeks RB	64,00% ; 53,33%;	84.512.000,00	IKU OPD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RSUD AD	Jumlah langganan koran/ majalah	475 Eksampler	2.850.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RSUD AD	Jumlah langganan koran/ majalah	475 Eksampler	2.850.000,00	
	Fasilitas kunjungan tamu	RSUD AD	Jumlah porsi makan dan minum tamu yang disediakan	857 porsi	9.440.000,00	Fasilitas kunjungan tamu	RSUD AD	Jumlah porsi makan dan minum tamu yang disediakan	857 porsi	9.440.000,00	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	RSUD AD	Jumlah porsi makan minum rapat dan Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat = 1112 porsi dan perjalanan dinas = 56 OH	72.222.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	RSUD AD	Jumlah porsi makan minum rapat dan Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat = 1112 porsi dan perjalanan dinas = 56 OH	72.222.000,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AD	Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit	64%	657.365.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AD	Nilai AKIP; Indeks RB	64,00% ; 53,33%;	657.365.000,00	IKU OPD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD AD	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik	12 bulan	582.750.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD AD	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik	12 bulan	582.750.000,00	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	RSUD AD	Jumlah Honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan jumlah OH perjalanan dinas dalam kota	Honorarium PTTD = 13 bulan dan perjalanan dinas dalam kota = 158 OH	74.615.000,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	RSUD AD	Jumlah OH perjalanan dinas dalam kota	Perjalanan dinas dalam kota = 158 OH	74.615.000,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AD	Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit	64%	72.050.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AD	Nilai AKIP; Indeks RB	64,00% ; 53,33%;	72.050.000,00	IKU OPD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	RSUD AD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	kendaraan roda empat = 2 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	72.050.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	RSUD AD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	kendaraan roda empat = 2 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	72.050.000,00	
6	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%	24.384.867.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AD	Nilai AKIP; Indeks RB; Nilai IKM	64,00% ; 53,33%; 81,00%	24.384.867.000,00	IKU OPD, IKM
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD AD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap	Rawat Jalan = 28.864 org dan Rawat Inap = 5.035 org	24.384.867.000,00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD AD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap	Rawat Jalan = 28.864 org dan Rawat Inap = 5.035 org	24.384.867.000,00	

II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	66% ; 80%	17.057.768.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	66% ; 82%; 65%	36.085.189.000	IKU OPD, SPM
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	66%	17.057.768.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	66%	35.339.189.000	IKU OPD, SPM
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD AD	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit	Interior Kamar Operasi/ MOT OK =1 Paket , Gedung Radiologi = 1 paket dan Gedung Rekam Medis = 1 Paket	7.159.375.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD AD	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit	Interior Kamar Operasi/ MOT OK =1 Paket dan Gedung Laboratorium = 1 paket	23.003.000.000	
	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD AD	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit kelas C	5 Paket Alat Kesehatan	9.898.393.000	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD AD	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit kelas C	2 Paket Alkes/Aldok DAK dan 1 Paket Alat/Aldok Penanganan Covid 19	11.391.129.000	
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD AD	Jumlah Barang Habis Pakai yang tersedia untuk pelayanan pasien Covid 19	2 Paket	945.060.000	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80%	-	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	82%; 65%	746.000.000	IKU OPD, SPM
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	RSUD AD	Jumlah Kunjungan Pasien Covid 19 yang dilayani di RS	360 orang	168.000.000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD AD	Jumlah Limbah Infeksius Covid 19 yang diangkut	2400 kg	48.000.000	
	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	RSUD AD	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	33 orang	275.000.000	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	RSUD AD	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	30 orang	275.000.000	
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD AD	Jumlah peserta yang divaksinasi di rumah sakit	305 orang	255.000.000	
III						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	66%	3.972.500.000,00	IKU OPD, SPM
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	66%	3.972.500.000,00	IKU OPD, SPM
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD AD	Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19	48 orang	3.972.500.000,00	
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSUD AD	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80%	998.700.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	66%	998.700.000,00	IKU OPD, SPM
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80%	998.700.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	66%	998.700.000,00	IKU OPD, SPM
	Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	RSUD AD	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit jumlah lembaga yang menerima hibah (PML)	Mitra RS = 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, , pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	998.700.000,00	Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	RSUD AD	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (dokter reveral, mitra RS dan pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org dan jumlah lembaga yang menerima hibah (PML)	Mitra RS = 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, , pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	998.700.000,00	
TOTAL ANGGARAN					63.219.443.550,00					94.371.864.550,00	

Adapun hasil perbandingan Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 dengan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2022 pada Tabel 17 (T-C.31) yang tertuang dalam Renja RSUD dr. Achmad Darwis adalah sebagai berikut :

Jumlah Program yang tertuang pada Rancangan Awal RKPD adalah 3 Program, 9 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan sedangkan pada Hasil Analisa Kebutuhan adalah 4 Program, 10 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran untuk penanganan Covid 19

2.5 Penalaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari Perangkat Daerah lain di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tidak memuat catatan perubahan untuk BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

TABEL 29 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Urusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan			Besaran/ Volume	Catatan
			Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan		
NIHIL							

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD dr. ACHMAD DARWIS

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan Nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu :

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5. Penguatan Sistem Kesehatan.

Adapun untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif dan lansia dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada produktif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS) guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi

5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan lima tujuan strategis yang dijabarkan menjadi delapan sasaran strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020-2024. Delapan Sasaran Strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akse, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih meningkatkan sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2022

Tujuan dan sasaran yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis sebanyak 2 tujuan, 2 indikator tujuan dan 2 sasaran dengan 6 indikator sasaran yang diuraikan sebagai berikut :

- I. Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan indikator tujuan : Persentase Capaian Indikator Mutu Pelayanan, Adapun Sasaran pada Tujuan Pertama adalah:
 1. Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikator sasarannya :
 - Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar
 - Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target

- Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target

II. Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),

Adapun Sasaran pada tujuan kedua adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator sasarannya :

- Nilai AKIP Rumah Sakit
- Nilai IRB Rumah Sakit
- Nilai IKM Rumah Sakit

Uraian tujuan dan sasaran yang akan dicapai RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021

– 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 30
Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target 2022
1	2	3	4	5	6	8
1	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Capaian Indikator Mutu Pelayanan	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	% jenis obat yang terpenuhi + %SDM yang sesuai standar + %Ketersediaan Sarpras, Alkes Sesuai Standar/ 3 X 100 %	66,00%
				Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target	Jumlah Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target/ Seluruh Indikator SPM Rumah Sakit X 100%	82,00%
				Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	Jumlah Indikator Mutu Nasional yang terpenuhi/ Seluruh Indikator Mutu Nasional X 100%	65,00%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Rumah Sakit	Nilai AKIP Rumah Sakit	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat	64,00%
				Nilai IRB Rumah Sakit	Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat	53,33%
				Nilai IKM Rumah Sakit	Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh RSUD	81,00%

Adapun tujuan dari rencana kerja RSUD tahun 2022 adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi rumah sakit.
2. Tersedianya sumber daya manusia sesuai standar kompetensi yang diharapkan dan mencukupi kebutuhan.
3. Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit baik peralatan kedokteran, peralatan kesehatan, peralatan gedung kantor, gedung laboratorium dan radiologi yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit, gedung rekam medis rumah sakit, gedung gizi yang representatif dan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dan gedung rawat inap lainnya guna menambah pengembangan pelayanan di rumah sakit.
4. Terlaksananya survey penilaian akreditasi rumah sakit versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 untuk tahun 2022 dengan lulus paripurna SNARS.
5. Terlaksananya kemitraan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Rumah Sakit lain sebagai mitra untuk reveral dokter spesialis dan kerjasama lainnya untuk pelayanan dan penunjang pelayanan rumah sakit.
6. Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan BLUD rumah sakit.
7. Terlaksananya pelayanan bedah sentral yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit.
8. Terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan.

Sasaran Rencana kerja RSUD tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Layanan Rumah sakit sesuai standar dan adanya layanan inovatif atau layanan pengembangan.
2. Meningkatnya jumlah tenaga non PNS/Honorer BLUD RSUD dr. Achmad Darwis Kab Lima Puluh Kota dan Tenaga PPPK untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, dokter umum, Perawat, Bidan, tenaga Administrasi, sopir, tenaga keamanan/Satpam dan tenaga penunjang lainnya serta terlaksananya pendidikan, pelatihan, Bimtek, workshop,

simposium dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM 66 %.

3. Meningkatnya kualitas dan utilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit baik peralatan kedokteran, peralatan kesehatan, peralatan gedung kantor, kendaraan dinas operasional, kendaraan ambulance untuk kegiatan pelayanan merujuk pasien, kendaraan ambulance untuk mobil jenazah, gedung laboratorium, gedung radiologi, gedung rekam medis, gedung gizi yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan pekarangan tempat parkir serta gedung rawat inap lainnya guna menambah pengembangan pelayanan di rumah sakit.
4. Meningkatnya pelaksanaan akreditasi rumah sakit versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 untuk tahun 2022 dengan lulus paripurna SNARS.
5. Meningkatnya pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan sesuai standar rumah sakit yang terakreditasi.
6. Meningkatnya penyelenggaraan manajemen Pelayanan Rumah sakit dan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).
7. Meningkatnya kemitraan dengan pihak ketiga untuk mendukung operasional pelayanan yaitu dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Rumah Sakit lain sebagai mitra untuk reveral dokter spesialis dan kerjasama lainnya untuk penunjang pelayanan.
8. Meningkatnya layanan bedah sentral rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit.

Pembangunan gedung kamar operasi RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun anggaran 2018 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Gedung kamar operasi terdiri dari 3 (tiga) ruangan kamar bedah yang belum bisa di operasioanlkan karena ruangan kamar bedah tersebut belum terisi baik sarana, prasarana dan alat kesehatannya.

Agar dapat dioperasionalkannya gedung kamar operasi tersebut membutuhkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Lima Puluh Kota sekiranya pemasangan MOT (Integrated System) tidak di akomodir dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022. Total dana yang dibutuhkan untuk pemasangan MOT (Integrated

System) di 3 kamar operasi yaitu sebesar Rp. 14.230.000.000 (Empat belas milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

9. Meningkatnya layanan terhadap masyarakat miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan.

Mulai tanggal 1 Januari 2019 tidak diberlakukannya lagi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk peserta BPJS yang memakai rekomendasi SKTM. Kemungkinan masih ada masyarakat miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum memiliki kartu kepesertaan BPJS sehingga masih menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mana ketika masyarakat itu berobat ke rumah sakit maka biaya tidak ditanggung oleh BPJS, untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibuka kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, yang mana Sub Kegiatan tersebut untuk pasien kurang mampu yang berobat ke RSUD dr. Achmad Darwis tapi belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan untuk berobat ke RSUD dr. Achmad Darwis yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

10. Meningkatnya layanan Laboratorium Rumah Sakit yang memenuhi standar Akreditasi Rumah Sakit. Dengan adanya pembangunan gedung Laboratorium baru yang memenuhi standar, maka pelayanan Laboratorium dapat dilakukan secara maksimal, sehingga pasien dapat dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Achmad Darwis.

Adapun layanan pengembangan yang direncanakan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 31

Rencana Pengembangan Produk layanan RSUD dr. Achmad Darwis

No	KEGIATAN	Pelayanan yang ada	Rencana Pengembangan	Pangsa Pasar Baru
1	Pelayanan Penyakit Dalam	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan Hemodialisa pasien dengan gagal ginjal dan pemeriksaan indoskopi/ gastroskopi pasien dengan ulkus tukak lambung	Pasien DM setiap tingkat, usia lanjut dan pasien dengan gagal ginjal

2	Pelayanan Penyakit Obgyn	Pelayanan kesehatan fisik ibu hamil, in partu dan nifas serta tindakan operasi SC dan kasus ginekologi	Pelayanan pelatihan ketrampilan fisik dan psikis dalam masa hamil, partus dan masa nifas	Pasangan usia subur yang isterinya akan dan sedang hamil
3	Pelayanan Penyakit Anak	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan tumbuh kembang anak Pelayanan NICU	Bayi dan balita bermasalah tumbuh dan kembang
4	Pelayanan Penyakit Bedah	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Operasi cimino untuk pasien HD	Penderita Penyakit Bedah dan pasien untuk tindakan Hemodialisa
5	Pelayanan Penyakit Jantung	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan Cateterisasi Laboratorium	Pasien kelainan jantung
6	Pelayanan Penyakit Paru	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan khusus paru baik rawat jalan maupun rawat inap yang terpisah dari penyakit lainnya dimulai dari pendaftaran pasien sampai pengambilan obat Pelayanan pemeriksaan Spirometri Pelayanan TB MDR	Pasien penyakit paru
7	Pelayanan Penyakit Syaraf	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan kasus geriatik terpadu dgn santun,bermutu, aman, cepat dan terjangkau dimulai dari pendaftaran pasien sampai pengambilan obat	Pelanggan Usia lanjut

8	Pelayanan penyakit THT	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan penyakit THT	Penderita THT
9	Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan dengan alat mikrodermabrasi	Penderita penyakit kulit dan Kelamin
10	Pelayanan PICU	Pelayanan Perinatologi	Pelayanan PICU	Anak dengan kondisi yang membutuhkan pelayanan intensif
11	Pelayanan Covid 19	Pelayanan Covid 19	Pelayanan Covid 19 untuk suspek dan pasien terkonfirmasi	Pasien Covid 19

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 oleh RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- e. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas
 - f. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2. Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - b. Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

4. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD dr. ACHMAD DARWIS

4.1 Rencana Kinerja OPD tahun 2022 RSUD dr. Achmad Darwis

Rencana Kinerja OPD tahun 2022 berdasarkan IKU OPD RSUD dr. Achmad Darwis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32.
Rencana Target Kinerja IKU OPD RSUD dr. Achmad Darwis

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2021	2022	
1	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	66,00%	66,00%	IKU OPD
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang tercapai target	81,72%	82,00%	IKU OPD
		Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	0%	65,00%	IKU OPD
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Rumah Sakit	Nilai AKIP Rumah Sakit	64,00%	64,00%	IKU OPD
		Nilai IRB Rumah Sakit	0%	53,33%	IKU OPD
		Nilai IKM Rumah Sakit	81,00%	81,00%	IKU OPD

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat 2 buah indikator yang baru di Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Achmad Darwis untuk tahun 2022 yaitu Persentase terpenuhinya Indikator Mutu Nasional dan Nilai IRB Rumah Sakit.

4.2 Rencana Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022

Adapun rincian rencana pendanaan RSUD dr. Achamad Darwis Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33 TC 33

Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

PERANGKAT DAERAH : RSUD dr. ACHMAD DARWIS										
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai AKIP; Nilai IRB; Nilai IKM	RSUD AD	64,00%; 53,33%; 81,00%	53.315.475.550,00	DAU	IKU OPD, IKM	65,00%; 58,75%; 82,00%	57.049.745.200,00	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	RSUD AD	64,00%; 53,33%	4.816.800,00	DAU	IKU OPD	65,00%; 58,75%	5.539.300,00	
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan serta jumlah OH perjalanan dinas dalam kota	RSUD AD	9 dokumen dan 51 laporan serta perjalanan dinas dalam kota = 34 OH	4.816.800,00	DAU		9 dokumen dan 51 laporan serta perjalanan dinas dalam kota = 17 OH	5.539.300,00	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	RSUD AD	64,00%; 53,33%	28.111.864.750,00	DAU	IKU OPD	65,00%; 58,75%	31.105.769.400,00	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, jumlah tenaga ASN yang menerima insentif dan jumlah PPPK	RSUD AD	221 orang, 12 bulan, 80 orang dan 6 orang	28.111.864.750,00	DAU		262 orang, 12 bulan, 83 orang dan 6 orang	31.105.769.400,00	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	RSUD AD	64,00%; 53,33%	84.512.000,00	DAU	IKU OPD	65,00%; 58,75%	92.955.000,00	
1 02 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan koran/ majalah	RSUD AD	475 Eksampler	2.850.000,00	DAU		475 Eksampler dan 3 buku	3.135.000,00	
1 02 01 2.06 08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah porsi makan dan minum tamu yang disediakan	RSUD AD	857 porsi	9.440.000,00	DAU		868 porsi	10.380.000,00	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah porsi makan minum rapat dan Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	RSUD AD	Rapat = 1112 porsi dan perjalanan dinas = 56 OH	72.222.000,00	DAU		Rapat = 1125 porsi dan perjalanan dinas = 64 OH	79.440.000,00	

1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	RSUD AD	64,00%; 53,33%	657.365.000,00	DAU	IKU OPD	65,00%; 58,75%	620.993.500,00
1	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik	RSUD AD	12 bulan	582.750.000,00	DAU		12 bulan	611.887.500,00
1	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah OH perjalanan dinas dalam kota	RSUD AD	Perjalanan dinas dalam kota = 158 OH	74.615.000,00	DAU		Perjalanan dinas dalam kota= 168 OH	9.106.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	RSUD AD	64,00%; 53,33%	72.050.000,00	DAU	IKU OPD	65,00%; 58,75%	108.075.000,00
1	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	RSUD AD	kendaraan roda empat = 2 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	72.050.000,00	DAU		kendaraan roda empat = 3 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	108.075.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai AKIP; Nilai IRB, Nilai IKM	RSUD AD	64,00%; 53,33%; 81,00%	24.384.867.000,00	BLUD	IKU OPD, IKM	65,00%; 58,75%; 82,00%	25.116.413.000,00
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap	RSUD AD	Rawat Jalan = 28.864 org dan Rawat Inap = 5.035 org	24.384.867.000,00	BLUD		Rawat Jalan = 28.864 org dan Rawat Inap = 5.035 org	25.116.413.000,00

1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	RSUD AD	66%	36.085.189.000	DAU, DAK	IKU OPD, SPM	67%	39.751.366.000
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	RSUD AD	66%	35.339.189.000	DAU, DAK	IKU OPD, SPM	67%	38.958.766.000
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit	RSUD AD	Interior Kamar Operasi/ MOT OK =1 Paket dan Gedung Laboratorium = 1 paket	23.003.000.000	DAU, DAK		Gedung Instalasi Radiologi = 1 paket, Gedung Rekam Medis = 1 paket, dan Gedung Rawat Inap (Perinatologi) = 1 paket	23.919.200.000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C	RSUD AD	2 Paket Alkes/Aldok DAK dan 1 Paket Alat/Aldok Penanganan Covid 19	11.391.129.000	DAU, DAK		5 Paket Alat Kesehatan	14.000.000.000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Barang Habis Pakai yang tersedia untuk pelayanan pasien Covid 19	RSUD AD	2 Paket	945.060.000			2 paket	1.039.566.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	RSUD AD	82,00%; 65,00%	746.000.000	DAU	IKU OPD, SPM	82,00%; 68,00%	792.600.000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kunjungan Pasien Covid 19 yang dilayani di RS	RSUD AD	360 orang	168.000.000			360 orang	184.800.000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Limbah Infeksius Covid 19 yang diangkut	RSUD AD	2400 kg	48.000.000	DAU		2400 kg	52.800.000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	RSUD AD	30 orang	275.000.000	DAU		40 orang	300.000.000
1	02	02	2.02	23	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Peserta yang di Vaksinasi di Rumah Sakit	RSUD AD	305 orang	255.000.000			305 orang	255.000.000

1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	RSUD AD	66%	3.972.500.000,00			67%	3.972.500.000,00
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	RSUD AD	66%	3.972.500.000,00			67%	3.972.500.000,00
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19	RSUD AD	48 orang	3.972.500.000,00		48 orang	3.972.500.000,00
1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target	RSUD AD	82,00%	998.700.000,00	DAU	IKU OPD, SPM	82,00%	508.000.000,00
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target; Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	RSUD AD	82,00%, 66,00%	998.700.000,00	DAU	IKU OPD, SPM	82,00%, 67,00%	508.000.000,00
1	02	05	2.01	01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit jumlah lembaga yang menerima hibah (PMI)	RSUD AD	Mitra RS = 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, , pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	998.700.000,00	DAU	Mitra RS = 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	508.000.000,00
JUMLAH								94.371.864.550,00				101.281.611.200,00

Tabel 34
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						46.161.675.550		60.599.637.459		
1	02	01														
1	02	01														
1	02	01	2,01													
1	02	01	2,01	06												
1	02	01	2,02													
1	02	01	2,02	01												

1	02	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	84.512.000						100 %	53.292.000	
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran/majalah			475 eksemplar	2.850.000	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	475 eksemplar	2.850.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan dan minum tamu yang disediakan			857 porsi	9.440.000	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	857 porsi	5.940.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah porsi makan minum rapat			56 OH 1112 porsi	72.222.000	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	56 OH 1112 porsi	44.502.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	657.365.000					100 %	648.535.000	
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik			12 bulan	582.750.000	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	582.750.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah OH Perjalanan Dinas Dalam Kota Jumlah pembayaran honorarium tenaga PPTD rumah sakit			158 OH 13 bulan	74.615.000	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	158 OH 13 bulan	65.785.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

1	02	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	%	100 %	72.050.000						100 %	72.050.000	
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (kendaraan roda 2) Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (kendaraan roda 4)		1 unit 2 unit	72.050.000	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	1 unit 2 unit	72.050.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	24.384.867.000					100 %	23.884.807.000		
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit (raw at inap) Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit (raw at jalan)		5035 orang 28864 orang	24.384.867,000	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pegawai RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	5035 orang 28864 orang	23.884.807.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	% %	80 % 66 %	0					80 % 66 %	11.799.428.495		
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	% %	80 % 66 %	0					80 % 66 %	9.378.837.520		
1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien raw at inap rumah sakit (Gedung Radiologi) Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien raw at inap rumah sakit (Gedung Rekam Medis) Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien raw at inap rumah sakit (Interior Kamar Operasi/MOT)		1 paket 1 paket 1 paket		Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	1 paket 1 paket 1 paket	2.480.443.809	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	

1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C				5 paket	0	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	5 paket	6.898.393.711	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Barang Habis Pakai yang tersedia untuk pelayanan pasien Covid 19				2 paket	0	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	2 paket	0	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	% %	% %		80 % 66 %	0						80 % 66 %	2.420.590.975	
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kunjungan Pasien Covid 19 yang dilayani di RS				360 orang	0	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	360 orang	1.889.453.475	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Limbah Infeksius Covid 19 yang diangkut				2400 kg	0	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	2400 kg	0	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu				33 orang	0	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	33 orang	250.000.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Peserta yang di Vaksinasi di Rumah Sakit				305 orang	0	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	305 orang	281.137.500	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	%	%		66 %	0						66 %	4.877.500.000	
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	%	%		66 %	0						66 %	4.877.500.000	
1	02	03	2,02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19				48 orang	0	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	Pegawai RSUD dr. Achmad Darwis	48 orang	4.877.500.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target	%	%	80 %	998.700.000					80 %	974.700.000	
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target	%	%	80 %	998.700.000					80 %	974.700.000	
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (dokter reveral) Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (Mitra RS) Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (Pendayagunaan Dokter Spesialis/ WKDS) umlah lembaga yang menerima hibah (PM)			3 orang 4 dokumen 2 orang 1 lembaga	998.700.000	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	3 orang 4 dokumen 2 orang 1 lembaga	974.700.000	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
TOTAL										46.161.675.550						60.599.637.459	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2022 ini dibuat sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk penyusunan RKPD untuk peningkatan kinerja rumah sakit di tahun 2022.

Dengan dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang kesehatan maka tantangan dan peluang bagi RSUD dr. Achmad Darwis dalam melaksanakan peningkatan mutu layanan dan meningkatkan kinerja layanan dan pemanfaatan layanannya. Tantangan kedepan adalah bagaimana RSUD dr. Achmad Darwis dapat melayani masyarakat sesuai standar pelayanannya dan sekaligus peluang bagi RS untuk meningkatkan kinerja layanannya.

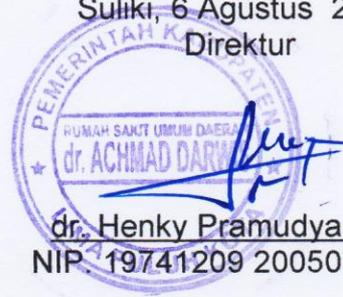
Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu maka setiap perubahan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik. Tahun 2022 ini sesuai dengan target sasaran RS untuk memenuhi persyaratan minimal RS maka direncanakan dan sesuai akreditasi rumah sakit yang Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 maka diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan gedung rawat inap yang memenuhi standar akreditasi yaitu gedung rekam medis yang memenuhi standar akreditasi, Rehabilitasi gedung – gedung pelayanan penunjang seperti Laboratorium, Radiologi, Fisiotherapy yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit serta peralatan kedokteran dan alat kesehatan baik medik maupun non medik diusulkan dengan usulan dana DAK bidang kesehatan. Sedangkan dengan dana APBD rumah sakit mengusulkan untuk kegiatan ruangan kamar operasi yang mana untuk gedung kamar operasi telah dibangun pada tahun 2018 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetapi belum termasuk interior ruangan kamar operasinya yaitu Modular Operating

Theater MOT (Integrated System) untuk 3 kamar OK. Untuk itu di tahun 2021 ini dianggarkan ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022 dengan rincian yaitu : Pemasangan Modular Operating Theater MOT (Integrated System) untuk 3 kamar OK. Di tahun 2021 telah dianggarkan untuk Pemasangan Modular Operating Theater (MOT) untuk Kamar Operasi, tetapi karena ada Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, maka anggaran tersebut di hilangkan untuk Realokasi Tahun 2021 tersebut. Oleh karena itu kami menganggarkan lagi di TA 2022 agar Gedung Kamar Operasi ini dapat dioperasionalkan dan dimanfaatkan untuk pelayanan bedah di RSUD dr. Achmad Darwis. Disamping itu juga perlu peningkatan manajemen pelayanan dengan mempersiapkan kegiatan survey akreditasi RS menuju lulus Paripurna SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) dan pengembangan layanan unggulan atau layanan inovatif.

Dengan pelaksanaan penerapan PPK-BLUD maka diharapkan mutu layanan dapat ditingkatkan. Total anggaran belanja yang dibutuhkan oleh RSUD dr. Achmad darwis untuk tahun 2022 sebesar Rp 78.528.239.550 dengan penganggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan honor pengelola kegiatan / Satker sebesar Rp. 19.959.364.750, penganggaran/ belanja BLUD tahun 2022 diperkirakan Rp 24.384.867.000,00, dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp 400.000.000,00, usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan RSUD dr. Achmad Darwis sebesar Rp. 17.057.768.000, Dana Covid 19 sebesar Rp. 15.033.796.000,00. Dengan demikian untuk anggaran tahun 2022 nanti masih dibutuhkan subsidi pemerintah daerah dari APBD atau dari dana alokasi umum (DAU) baik itu untuk opeasional maupun untuk investasi sebesar Rp. 1.692.443.800,00

Demikian Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja RSUD dr. Achmad Darwis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang

Suliki, 6 Agustus 2021
Direktur



dr. Henky Pramudya, Sp.B
NIP. 19741209 200501 1 006



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan



yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :

- a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2022;
- b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

- a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

: Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2021 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 27 November 2020

 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	24/11/2020
--------------------------------	------------

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 328 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 November 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Keuangan	Sekretaris
	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota
	Kabag Humas Dan Protokoler	Anggota
	Kasubag PP Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Koordinasi Antar Lembaga	Anggota
	Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
	Kasubag Kelembagaan	Anggota
	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Jabatan	Anggota
	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau	Anggota
	Kasubag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Sarana Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sarana Produksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD	Anggota
	Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM	Anggota
	Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota
	Kasubag Anggaran	Anggota
	Kasubag Humas dan Pemberitaan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Anggota
	Kasubag Protokoler	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Auditor Madya	Anggota
	Auditor Muda	Anggota
	Auditor Pertama	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Administrasi dan Umum	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
	Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Seksi Bina Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil	Anggota
	Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan	Anggota
	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Pemadam	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
	Kabid E-Government	Anggota
	Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Media Massa	Anggota
	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Anggota
	Kasi Layanan Manajemen Data Informasi	Anggota
	Kasi Layanan Keamanan Informasi	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK	Anggota
	Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasi Statistik	Anggota
	Kasi Persandian	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Dinas Tanhorbun	Ketua
	Sekretaris Tanhorbun	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
	Kabid Tanaman Hortikultura	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kabid Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kabid Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Penyuluhan	Anggota
	Kasi Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Daerah	
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
43.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris
	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang	Anggota
	Kasi Pelayanan Promosi	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 27 November 2020



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM

24/11/2020